

Membangun Kesetaraan Berpolitik

*Jejak Langkah Penguatan Hak Politik
Penyandang Disabilitas dan Lansia Marjinal
pada Pemilu 2014 di Jawa Barat*

Prolog

Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf

Membangun Kesetaraan Berpolitik

*Jejak Langkah Penguatan Hak Politik
Penyandang Disabilitas dan Lansia Marjinal
pada Pemilu 2014 di Jawa Barat*

Tim Penyusun

Sapei Rusin
Dadang Sudardja
Rahmat Hidayat
Yani Maryani



Membangun Kesetaraan Berpolitik

*Jejak Langkah Penguatan Hak Politik Penyandang Disabilitas
dan Lansia Marjinal pada Pemilu 2014 di Jawa Barat*

Tata Letak dan Design Sampul
Mateu Djumhari

Diterbitkan oleh
Bandung Trust Advisory Group (B_Trust)
atas dukungan
**The European Instrument for Democracy
and Human Rights (EIDHR) - European Union**

Sekretariat B_Trust
Jl. Citamiang No. 61 Bandung
Jawa Barat 40121
Indonesia

Kata Pengantar

‘Kepercayaan’ antar pihak merupakan fondasi utama dalam pembangunan kembali tatanan sosial, ekonomi dan politik yang menjadi agenda utama reformasi. B_Trust didirikan atas dasar keinginan yang kuat untuk turut berkontribusi pada pembangunan kembali (*re-building*) sikap saling percaya antar pihak dengan komponen yang terkait dalam penyelenggaraan urusan publik tersebut.

Salah satu aspek yang cukup vital dalam upaya pembangunan kembali ‘kepercayaan’ di tengah-tengah kehidupan publik adalah informasi. Oleh karena itu, upaya untuk mendorong terciptanya praktek keterbukaan dan transfer informasi secara kredibel dan bertanggung jawab antara para pihak yang berkepentingan dalam urusan-urusan publik menjadi salah satu fokus utama B_Trust.

Salah satu bentuk kontribusi tersebut adalah upaya B_Trust untuk penguatan pemenuhan hak-hak politik kelompok masyarakat yang dimarjinalkan dalam relasi-relasi sosial, ekonomi dan politik. Upaya tersebut diwujudkan dalam suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan penghargaan, pengakuan dan pemenuhan hak-hak politik kelompok masyarakat penyandang disabilitas dan lansia marjinal dengan membangun kesetaraan politik pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (pemilu). Sejak Pemilu tahun 2009, B_Trust telah terlibat dalam kerja-kerja pendidikan dan diseminasi informasi untuk penyandang disabilitas dan lansia.

B_Trust kembali melakukan upaya yang sama pada Pemilu tahun 2014. Atas bantuan pendanaan dari Uni Eropa dan dukungan dari berbagai pihak terkait, B_Trust dapat memperluas ruang lingkup jangkauan program ini. Program yang semula hanya berfokus 5 kota/kabupaten pada tahun 2009, dapat diperluas cakupannya menjadi 26 kota/kabupaten di Jawa Barat pada tahun 2014. Pendekatan yang dilakukan pada Pemilu tahun 2014 tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan pada Pemilu tahun 2009. B_Trust terus melakukan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya pada kelompok pemilih penyandang disabilitas dan lansia di Provinsi Jawa Barat.

Rangkaian kegiatan tersebut telah dimulai sejak awal tahun 2013. Kegiatan dimulai dengan pengorganisasian tim fasilitator dan relawan di lapangan, lalu dilanjutkan dengan pelatihan-pelatihan, pengembangan kerjasama dengan KPUD dan Panwaslu, sosialisasi, dan kampanye publik, sampai dengan pengawasan pelaksanaan pencoblosan pada tanggal 9 April dan 9 Juli 2014.

Rangkaian kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan lancar atas segala usaha yang dilakukan oleh Ibu Yuyu Komariah, Deputy Direktur B_Trust sebagai penanggung jawab kegiatan ini; Kang Sapei Rusin, komandan 'Tim inti' pelaksana kegiatan; serta anggota-anggota tim yaitu Kang Dadang Sudardja, Teh Yani Maryani, dan Kang Rahmat Hidayat. Tim ini telah berhasil memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai hasil-hasil sesuai dengan harapan. Sebagai pemimpin B_Trust, saya sangat mengapresiasi kerja keras mereka.

Saya juga ingin memberikan apresiasi dan penghargaan untuk para koodinator fasilitator/relawan beserta para anggota tim di setiap kota/kabupaten yang telah menjadi ujung tombak pelaksanaan program ini. Meskipun sering menghadapi sejumlah hambatan, namun kecerdasan, kreatifitas dan kerjasama yang apik, dapat membuat mereka mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan baik.

Saya juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi untuk pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi untuk keberlangsungan program ini. Pihak-pihak tersebut antara lain: (i) Lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu 2014 dari KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kota/Kabupaten, Bawaslu serta Panwas Provinsi dan Kota/Kabupaten se-Jawa Barat; (ii) Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat dan seluruh Dinas Sosial Kota/Kabupaten se-Jawa Barat; (iii) Para pimpinan organisasi penyandang disabilitas dan lansia; (iv) Para pimpinan organisasi masyarakat sipil di seluruh kota/kabupaten; (v) Media massa, baik cetak maupun elektronik; dan (vi) Tokoh-tokoh masyarakat di masing-masing kota/kabupaten.

Dengan selesainya penyelenggaraan seluruh rangkaian kegiatan tersebut, kami berinisiatif untuk mendokumentasikan dan menuliskan pengalaman kami agar dapat disuguhkan melalui buku ini. Meskipun masih berupa suguhan yang sederhana, kami percaya bahwa banyak pembelajaran yang kita semua dapat

peroleh dari pengalaman ini. Kami juga berharap bahwa penulisan buku ini dapat melahirkan gagasan, inisiatif, dan kerja nyata yang lebih luas dari berbagai pihak. Semoga dengan terjadinya hal-hal tersebut, kita dapat bersama-sama membangun demokrasi yang lebih inklusif dan berkualitas di Republik Indonesia.

Salam hormat,

Ir. Siswanda H. Sumarto, MPM

Direktur Senior

Bandung Trust Advisory Group (B_Trust)

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel dan Diagram	viii
Daftar Istilah	x
Prolog	1
Bab 1 Demokrasi dan Hak Politik Penyandang Disabilitas dan Lansia	4
1.1 Membangun Demokrasi Inklusif	4
1.2 Hak Politik Penyandang Disabilitas dan Lanisa	7
1.2.1 Penyandang Disabiitas	7
1.2.2 Lanjut Usia (Lansia)	12
Bab 2 B_Trust dan Pemilu yang Inklusif	16
2.1 B_Trust, Dari Bandung untuk <i>Re-Building Public Trust</i>	16
2.2 Membangun Kesetaraan Berpolitik dalam Pemilu	17
2.3 Pilihan Pendekatan dan Strategi	24
Bab 3 Menggalang Dukungan dan Mengorganisir Relawan	26
Bab 4 Kunjungan Komunitas dan Dari Pintu ke Pintu	36

4.1	Kunjungan Komunitas	36
4.2	Kunjungan Dari Pintu ke Pintu	40
	Panduan Kunjungan Pintu ke Pintu	41
	Panduan Berkomunikasi Dengan Kelompok Penyandang Disabilitas	42
	Panduan Komunikasi Dengan Kelompok Lansia	42
4.3	Hasil Angket Kunjungan Komunitas dan Dari Pintu ke Pintu	46
	Pengalaman Menyalurkan Hak Pilih	48
	Persepsi Responden Dampak Ekonomi Pemilu 2014	51
	Pemilu 2014 dan Kepentingan Kelompok Sasaran	52
	Kepercayaan terhadap Wakil Rakyat dan Presiden Terpilih	53
	Penguasaan Informasi Responden	54
Bab 5	Antusiasme pada Pemilu 2014	57
	Pemantauan pada Hari H	58
	Hasil Angket	62
	Epilog	64
	Lampiran Daftar Pemberitaan Media	68

Daftar Tabel dan Diagram

Tabel 1	Perbandingan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2009 dan Perkiraan Partisipasi dalam Pemilu 2014	19
Tabel 2	Data Penyandang Disabilitas di Jawa Barat	21
Tabel 3	Proyeksi Pertumbuhan Populasi Berdasarkan Kelompok Usia di Jawa Barat 2010 – 2014	22
Tabel 4	Proyeksi Populasi di Jawa Barat 2010 – 2014	23
Tabel 5	Daftar Koordinator Fasilitator/Relawan	30
Tabel 6	Panduan Kerja Koordinator Kabupaten/Kota	32
Tabel 7	Pelaksanaan FGD di Kota/Kabupaten	34
Tabel 8	Pelaksanaan Community Visit	39
Tabel 9	Jumlah dan Karakteristik Responden per Kabupaten/Kota	47
Tabel 10	Pengalaman Responden dalam Menyalurkan Hak Pilih	49
Tabel 11	Alasan Tidak Menyalurkan Hak Pilih pada Pemilu	49
Tabel 12	Pengalaman Responden dalam Menyalurkan Hak Pilih Per Kabupaten/Kota di Jawa Barat	50

Tabel 13	Persepsi terhadap Dampak Ekonomi Pemilu 2014	51
Tabel 14	Persepsi Dampak Pemilu terhadap Kepentingan Kelompok Sasaran	52
Tabel 15	Persepsi terhadap Keterwakilan Kepentingan	53
Tabel 16	Persepsi Responden berdasarkan Kabupaten/Kota	53
Diagram 1	Penguasaan Informasi Responden	55
Tabel 17	Tingkat Partisipasi Kel. Sawangan Lama dan Sawangan Baru	60
Tabel 18	Tingkat Partisipasi Pemilih Lansia di Beberapa TPS Kabupaten Bogor	61
Tabel 19	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	63
Diagram 2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	63

Daftar Istilah

AGENDA	Asean General Election Network for Disabilities Access
B_Trust	(Bandung Trust Advisory Group) adalah organisasi nirlaba yang berpusat di Kota Bandung. Pilihan nama organisasi yang didirikan pada bulan Juni 2001 oleh sejumlah pegiat pemberdayaan masyarakat ini dilatari oleh konteks sosial politik yang mewarnai masa transisi paska lengsernya Soeharto
BPS	Badan Pusat Statistik
CPRD	Konvensi Hak Penyandang Disabilitas
CSO	Organisasi Masyarakat Sipil
DCT	Daftar Calon Tetap
Disabilitas	Ada yang memaknai sebagai orang yang kehilangan anggota tubuh, pengguna kursi roda, tuna rungu atau tuna netra, dan mereka yang memiliki kesulitan berbicara. Meskipun anggapan ini ada benarnya, tetapi disabilitas lebih dari sekedar itu. Disabilitas tidak hanya meliputi kedisabilitas yang terlihat, tapi juga setiap jenis kedisabilitas yang menghambat kegiatan seseorang sehari-hari.

DP-4	Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
DPT	Daftar Pemilih Tetap
ESCAP	Economic and Social Commission for Asia and The Pacific
Golput	Golongan Putih
ICCPR	International Covenant for Civil and Political Right
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health
Kognisi	Kemampuan untuk memahami dan komunikasi
KPU	Komisi Pemilihan Umum
Lansia	Lanjut Usia
LSI	Lembaga Survei Indonesia
MUI	Majelis Ulama Indonesia
Pemilu	Pemilihan Umum
Pileg	Pemilihan Legislatif
Pilpres	Pemilihan Presdient-Wakil Presiden
TPAK	Tingkat Partipasi Angka Kerja
TPS	Tempat Pemungutan Suara
UDHR	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
UNDP	United Nations Development Programme
WHO	World Health Organisation

Prolog

Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf

*Guru Besar Hukum Tata Negara dan Administrasi
Negara pada Universitas Katolik Parahyangan Bandung*

Buku yang tengah dibaca ini yang berjudul “*Membangun Kesetaraan Berpolitik: Jejak Langkah Penguatan Hak Politik Penyandang Disabilitas dan Lansia Marjinal pada Pemilu 2014 di Jawa Barat*” merupakan buku yang banyak memberi informasi yang sangat perlu dan penting bagi pemahaman kita dalam menyelenggarakan hajat demokrasi. Buku ini berisi *empirical evidence* dan *legal evidence* yang mencoba memberikan konfirmasi, klarifikasi, koreksi, dan rekomendasi bagi kebijakan dan pelayanan penyelenggaraan pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah yang terkait dengan hak politik dari kaum penyandang disabilitas dan kaum lansia. Mengapa menjadi perlu dan penting untuk diketahui karena tiga hal, pertama, Buku ini memberikan pemahaman secara faktual, komprehensif, dan terukur apa yang terjadi pada pemberian kedudukan, pelibatan, dan pelayanan bagi penyandang disabilitas dan lansia dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang sudah berlangsung di tanah air.

Kedua, dari buku ini begitu banyak memberikan pembelajaran bagi kita bahwa ternyata selama ini ada kebijakan hukum (*legal policy*) dan pelaksanaan demokrasi yang telah mengabaikan, membiarkan, dan melalaikan hal yang fundamental dalam sendi negara hukum yang demokratis yakni bahwa setiap warga

negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih, tanpa dibedakan karena persoalan penyandang disabilitas dan lansia. Hal itu sesungguhnya tidak sejalan dengan amanat konstitusi kita sebagaimana termaktub dalam Pasal 28I UUD 1945 bahwa “setiap orang berhak dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Artinya adalah semua harus terwakili.

Ketiga, Buku ini mempertegas mengenai konsep-konsep kunci yang harus terelaborasi lebih aplikatif, detail dan implementatif, yakni bagaimana membangun fondasi demokrasi dan hukum yang lebih adil, rasional, dan nondiskriminatif dengan muatan moral yang kental, serta bagaimana membumikan idealisme demokrasi yang berwajah keadaban ke dalam kehidupan politik praktis. Dengan memastikan adanya keterlibatan kaum disabilitas dan kaum lansia melalui kebijakan yang mengakui, menghormati, dan memenuhi hak politiknya, sesungguhnya mencerminkan derajat keadaban kita.

Mengapa jawabannya adalah muatan moral di dalam hukum yang adil, rasional, dan nondiskriminatif guna mengatur kehidupan demokrasi yang besendikan nilai-nilai keadaban? Karena perihal moral merupakan penopang utama dalam pembangunan masyarakat yang bermartabat dan memiliki harga diri. Suatu keniscayaan bahwa negeri ini akan tegak mandiri, maju, dan sejahtera bila moral para penyelenggara negara dan pemerintahan sangat memperhatikan dengan seksama amanat Pasal 28D UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Apabila amanat UUD 1945 tersebut diamalkan secara konsekuen dan konsisten, maka pada hakikatnya kita telah pula menjalankan ajaran agama yakni menghargai apa yang telah menjadi kehendak dan takdir Tuhan Yang Maha Adil. Tidak ada hak sedikitpun bagi manusia untuk menafikan apa yang telah Tuhan ciptakan.

Sungguh saya memberi apresiasi atas apa yang telah kawan-kawan B_Trust kontribusikan bagi kualitas

penyelenggaraan pemilu yang demokratis yakni dengan melakukan riset yang mendalam bagaimana potret penyelenggaraan pemilihan umum dalam kaitannya dengan pelibatan kaum disabilitas dan kaum lansia. Insya Allah buku ini akan banyak manfaatnya tidak hanya untuk pengambil kebijakan, penyelenggara, dan peserta pemilihan umum, tapi juga bagi kaum disabilitas dan lansia itu sendiri yang dapat menjadi sumber motivasi dan inspirasi. Wallahu a'lam. Terima kasih.

Bab 1

Demokrasi dan Hak Politik Penyandang Disabilitas dan Lansia

1.1 Membangun Demokrasi Inklusif

Untuk membangun rezim demokratis yang kuat dan melembaga, setelah runtuhnya rezim otoriter dan situasi politik tidak menentu. Ditambah fragmentasi sipil, militer frustrasi dan merasa terpojokan atas perannya mendukung rezim masa lalu, aturan dan prosedur (*rule of the game*) baru yang mewakili sistem demokrasi belum terbentuk, perlu dijalankan konsolidasi demokrasi sebagai upaya merawat stabilitas dan persistensi demokrasi.

Konsolidasi demokrasi, tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada prosedur dan lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat sipil. Bahkan menurut Laurence Whitehead (1989), konsolidasi demokrasi mencakup peningkatan secara prinsipil, komitmen seluruh elemen masyarakat-negara pada aturan main demokrasi.

Demokrasi bisa terkonsolidasi bila aktor-aktor politik, partai politik, kelompok kepentingan, elemen-elemen masyarakat dan yang lainnya, menganggap tindakan demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan, dan tidak ada aktor atau kelompok yang mempunyai klaim veto terhadap tindakan pembuat keputusan yang sudah terpilih secara demokratis. Dan yang jauh lebih penting, konsolidasi demokrasi itu penanaman demokrasi dalam budaya politik masyarakat. Maka, Pemilihan Umum (pemilu)

merupakan salah satu proses menuju konsolidasi demokrasi.

Pemilu merupakan bagian dari proses penguatan dan pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) untuk memilih pemimpin yang mumpuni, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Ia merupakan implementasi demokrasi dan sarana *political exercise* untuk penguatan infrastruktur demokrasi, baik nasional maupun lokal dan juga untuk mereformasi birokrasi. Karena pemilu tidak bisa dipisahkan dari proses demokrasi atau pendalaman demokrasi untuk melembagakan nilai-nilainya.

Pemilu merupakan tahapan kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sangat penting dan strategis. Kualitas kepemimpinan nasional yang dihasilkan dari pemilu, tentunya berbanding lurus dan merupakan cerminan dari lancarnya keseluruhan proses pemilihan umum. Parameter keberhasilan Pemilihan Umum antara lain ketepatan waktu seluruh jadwal yang ada, tersedianya seluruh kelengkapan pemilu dalam jumlah dan kualitas seperti yang telah ditentukan, terantisipasi seluruh potensi gangguan yang mengancam keberhasilan pelaksanaan pemilu dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi.

Kendala cukup besar pada Pemilu adalah tingkat partisipasi golput yang masih tinggi. Lihat saja Pemilihan Umum 2009 yang menghabiskan anggaran hingga 14 triliun rupiah, tetapi tingkat partisipasi Golongan Putih (golput) mencapai 39,1 %. Dari 171 juta hak suara masyarakat, total suara yang masuk adalah 104.099.785. Angka golput pada Pemilu 2009 ini merupakan yang tertinggi dibanding pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 1999 sebanyak 10,21 % dan pemilu 2004 sebanyak 23,34 %.

Salah satu alasan kenapa mereka memilih golput, karena hasil pemilu tidak dapat dinikmati seluruh masyarakat, tak ada perubahan hidup bagi masyarakat, kehidupan berjalan seperti biasa, seperti tak pernah ada pemilu. Selain itu mereka yang memiliki hak pilih tetapi tidak mau menggunakan hak pilihnya, disebabkan karena apatisisme. Ada pula yang mau menggunakan hak pilihnya namun karena berbagai keterbatasan sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya, seperti TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang jauh, kondisi fisik yang tidak memungkinkan, tidak mendapatkan akses data informasi yang memadai, dan sebagainya. Atau ada pula yang datang ke TPS, namun semua gambar partai atau caleg atau presiden dicoblosnya.

Memang perang dingin terjadi dalam pemilu April 2014 yang baru saja berlalu, tidak hanya antara Partai Politik dan antara caleg, tapi juga antara golput dan pemerintah yang menginginkan golput tidak ada. "Ketakutan" pemerintah terhadap golput memang beralasan, karena sebuah pesta demokrasi jika dipenuhi oleh golput, tentu demokrasi menjadi sepi. Maka tak heran kemudian Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan golput.

Golput bukanlah sebuah gerakan terorganisir dengan baik, ia lahir dengan sendirinya tanpa komando resmi dari siapapun, lepas dari sistem manajemen sebuah organisasi. Karena golput merupakan akumulasi keinginan dari personal rakyat. Dan saat pemilu menjadi ruang sunyi bagi sebuah pesta demokrasi, itu artinya demokrasi telah gagal ditegakkan di negeri ini. Paling tidak, demokrasi tetap berlangsung tapi kurang sehat.

Berdasarkan data yang diungkapkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDP (*United Nations Development Programme*), 93 % pemilih di Indonesia memiliki keinginan untuk memilih. Dari 93 % sebanyak 34 % tidak memilih karena tidak tahu apa yang harus dilakukan dan tidak mengetahui jadwal Pemilihan Umum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara informasi yang seharusnya diketahui oleh semua masyarakat, prosedur pemilihan yang harus dilakukan dengan proses pendidikan politik yang dilakukan baik oleh pemerintah, partai politik dan organisasi masyarakat.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia. Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, diketahui jumlah penduduk Jawa Barat sebesar 43,053,732 jiwa. Jumlah ini meningkat menjadi 49.153.773 orang, berdasarkan data hasil Pemerintah daerah Jawa Barat pada saat melakukan penyusunan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP-4) Pilgub Jabar 2013.

Berdasarkan data DP-4 yang telah diserahkan Pemda Jawa Barat ke KPU Jawa Barat, potensi pemilih di Jawa Barat sebesar 36.636.312 orang. Besarnya jumlah pemilih di Jawa Barat tidak dibarengi oleh kegiatan pendidikan pemilih yang intensif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki keterbatasan, baik secara finansial maupun sumber daya manusia, untuk dapat melakukan informasi pemilu dan pendidikan pemilih kepada seluruh lapisan masyarakat. Beberapa lapisan yang belum terjangkau informasi pemilu dan pendidikan pemilih diantaranya pemilih pemula, pemilih perempuan dan kelompok marjinal.

Berdasarkan hasil pemantauan, kelompok lanjut usia marjinal dan penyandang disabilitas, merupakan kelompok marjinal yang membutuhkan perhatian khusus dalam mendapatkan diseminasi pemilu dan pendidikan pemilih. Kelompok lansia marjinal dan kelompok difabel merupakan kelompok yang sering kali kurang mendapatkan perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat. Padahal jumlah kelompok lansia marjinal di Jawa Barat, mencapai lebih dari 2 juta jiwa, dan memberikan kontribusi signifikan pada pemilu 2014 nanti.

1.2 Hak Politik Penyandang Disabilitas dan Lansia

1.2.1 Penyandang Disabilitas

Dalam bahasa orang awam, disabilitas biasanya masuk ke dalam kategori jamak, seperti orang yang kehilangan anggota tubuh, pengguna kursi roda, tuna rungu atau tuna netra, dan mereka yang memiliki kesulitan berbicara. Meskipun anggapan ini ada benarnya, tetapi disabilitas lebih dari sekedar itu. Disabilitas tidak hanya meliputi kedisabilitas yang terlihat, tapi juga setiap jenis kedisabilitas yang menghambat kegiatan seseorang sehari-hari.

Menurut laporan Komisi ekonomi Sosial Asia dan Pasifik atau *Economic and Social Commission for Asia and The Pacific* (ESCAP), sebuah Badan regional PBB untuk Asia Pasifik, tanggapan responden terhadap pertanyaan mengenai jenis-jenis disabilitas beragam. Beberapa responden lebih fokus kepada disabilitas fisik, sensori, dan intelektual, sementara responden yang lain juga mengikutsertakan disabilitas psiko-sosial dan disabilitas yang tak terlihat, seperti kesulitan berbicara dan gangguan perkembangan.

Di lain pihak, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Internasional atau ICF (*International Classification of Functioning, Disability and Health*) menggabungkan model sosial dan medis, mengukur keberfungsian individu ke dalam enam wilayah: kognisi (kemampuan untuk memahami dan komunikasi), gerak (kemampuan untuk bergerak dan bepergian), pemeliharaan diri (kemampuan untuk menjaga kebersihan diri, berpakaian, makan, dan hidup mandiri), bergaul (kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain), kegiatan sehari-hari (kemampuan untuk memikul tanggung jawab di rumah, sekolah, dan pekerjaan), partisipasi di dalam masyarakat (kemampuan untuk terlibat di dalam kegiatan di masyarakat, umum, dan rekreasi).

Pandangan atau definisi mengenai disabilitas bukan pekerjaan mudah, karena setiap elemen masyarakat mempunyai perspektif yang berbeda-beda. Ada kelompok yang melihatnya sebagai masalah kesehatan sementara kelompok lain mungkin melihatnya semata sebagai pihak yang perlu diberi derma. Ada juga yang percaya bahwa disabilitas itu sendiri sebenarnya bukan merupakan penghalang bagi seseorang untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat, tetapi disabilitas adalah hambatan yang ada di lingkungan, misalnya, gedung yang tidak bisa diakses. Lagi pula, Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), sebuah konvensi PBB yang diakui secara universal, tidak memuat definisi yang pasti mengenai disabilitas.

Alih-alih, CRPD pada bagian pembukaannya menyatakan bahwa disabilitas adalah konsep yang terus berkembang, disabilitas lebih merupakan akibat dan bukan penyebab bagi ketidak mampuan seseorang untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat. Konsep ini juga digunakan oleh satu instrumen

internasional lain, yaitu *International Classification of Functioning, Disability, and Health* (ICF), yang menggunakan istilah disabilitas sebagai istilah payung yang mengacu kepada keberfungsian individu, yaitu kedisabilitas, keterbatasan aktifitas, dan pembatasan partisipasi.

Belakangan ini ada gejala yang menunjukkan terjadinya transisi dalam memandang disabilitas dari model medis ke model sosial. Model medis memandang disabilitas sebagai masalah kesehatan, sementara model sosial memandang disabilitas sebagai hasil dari interaksi sosial. Kedua model ini tidak bisa dilihat secara terpisah, karena disabilitas juga berakar dari dan mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang dan kedua model ini saling melengkapi.

Merujuk pada berita yang dilansir dalam website AGENDA (*Asean General Election Network for Disabilities Access*), *The World Report on Disability* memperkirakan bahwa 15 % populasi dunia, lebih dari satu miliar orang, hidup dengan disabilitas, dan 2,2 % mengalami kesulitan yang serius karena kondisi itu. Namun, laporan ini juga menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada data yang memadai mengenai jumlah penyandang disabilitas. Hal ini terjadi karena metodologi pengumpulan data yang tidak beragam dan tidak standar yang dilakukan di setiap negara. Data yang memadai sangat diperlukan sebagai dasar untuk merumuskan dan mengembangkan strategi dan rencana dalam memperbaiki kesejahteraan hidup penyandang disabilitas.

Usaha untuk mengumpulkan data global tentang disabilitas telah dilakukan oleh PBB melalui DISTAT, yang ditujukan untuk menyimpan statistik disabilitas di seluruh dunia. Pangkalan data ini terbuka bagi setiap orang yang membutuhkannya. Namun, metode dan standar yang diterapkan oleh negara-negara yang memberikan datanya masih beragam.

Dengan demikian, tingkat prevalensi masing-masing negara tidak bisa diperbandingkan. Berdasarkan perkiraan yang diberikan oleh pemerintah kepada *World Health Organisation* (WHO) jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sampai bulan Juni 2011 sebanyak 36.841.956 orang. Jumlah ini merupakan yang terbesar dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.

Tiga tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 10 November 2011, Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Pengesahan ini dilatar belakangi oleh dikeluarkannya Resolusi Nomor A/61/106 mengenai *Convention on The Right of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) oleh Majelis

Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 13 Desember 2006. Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan diambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi ini.

Pemerintah Indonesia telah menanda tangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penanda tangan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas. Indonesia menandatangani konvensi ini tanpa reservasi.

Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas ini, tidak terlepas dari beberapa instrumen legal internasional, yang menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas yang telah lahir sebelumnya. Traktat tersebut adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), disusun dan disahkan pada Sidang Umum PBB pada bulan Desember 1948 di Paris, sebagai dokumen pertama yang mengakui hak-hak bagi setiap manusia terlepas dari status, kewarga negaraan, agama, atau budaya. Dalam UDHR, hak-hak politik tercantum dalam Pasal 21 ayat 1 dan 3, yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan di negaranya dan pemerintahan harus diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat dan dinyatakan dalam Pemilihan Umum yang dilakukan secara berkala.

Meskipun UDHR tidak mengikat secara hukum, dokumen ini telah diadopsi oleh komunitas internasional dalam penyusunan traktat untuk isu yang spesifik seperti hak-hak politik, pekerja migran, kesetaraan gender, perlindungan anak, dan lain-lain.

Perlindungan hak-hak politik bagi setiap warga negara juga tercakup dalam ICCPR (*International Covenant and Political Rights*) yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966 dan mulai berlaku pada tahun 1975. Traktat ini mengikat secara hukum bagi Negara Pihak. *International Covenant Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) yang telah diratifikasi Indonesia pada 30 September 2005 dan mengesahkan ICCPR menjadi UU No. 12/2005 pada tanggal 28 Oktober 2005.

Dengan pengesahan ini Indonesia telah mengikat ICCPR menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Ratifikasi ini menimbulkan konsekuensi terhadap pelaksanaan hak-hak manusia, karena negara Indonesia

telah mengikatkan diri secara hukum. Hak-hak sipil dan politik, merupakan hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia, dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara, agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik, yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara.

Di dalam perlindungannya, peran negara harus dibatasi karena hak-hak sipil dan politik merupakan *negative right* (hak dan kebebasan akan terjamin dan terpenuhi apabila peran negara dibatasi). Namun perbedaan antara hak sipil dan politik yaitu, hak sipil adalah hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia, sedangkan hak politik ialah hak dasar dan bersifat mutlak - melekat di dalam setiap warga negara yang harus dijunjung tinggi dan di hormati oleh negara dalam keadaan apapun.

Sebagai bentuk penekanan pada berbagai konvensi yang telah dikeluarkan sebelumnya, CRPD diberlakukan sebagai instrumen legal bagi perlindungan dan promosi hak-hak penyandang disabilitas. Pada bagian pembukaan konvensi ini, Negara-Negara Pihak mengakui bahwa disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang, dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya (bagian e).

Selain itu, diakui juga bahwa diskriminasi atas setiap orang berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang (bagian h), mengakui pentingnya otonomi dan kemerdekaan individu bagi penyandang disabilitas, termasuk kebebasan mereka untuk menentukan pilihan (bagian n) serta penyandang disabilitas harus memiliki kesempatan untuk secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan program, termasuk yang terkait secara langsung dengan mereka (bagian o).

Lebih lanjut, berbagai hak penyandang disabilitas tercantum dan diatur pada berbagai pasal. Hak-hak tersebut antara lain:

- Hak aksesibilitas, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta terhadap fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik (Pasal 9);
- Hak untuk hidup (pasal 10);
- Hak untuk mendapat jaminan perlindungan dan keselamatan dalam situasi beresiko seperti konflik bersenjata, darurat kemanusiaan, bencana alam dan lainnya (pasal 11);
- Hak atas pengakuan yang setara di hadapan hukum (pasal 12);

- Hak atas keadilan (pasal 13);
- Hak atas kebebasan dan keamanan (pasal 14);
- Hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental fisik (pasal 17);
- Hak atas kebebasan bergerak, memilih tempat tinggal dan kewarga negaraan (pasal 18);
- Hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan semua bentuk komunikasi sesuai pilihan (pasal 21);
- Hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai pada pendidikan (pasal 24) dan kesehatan (pasal 25) tanpa diskriminasi;
- Hak untuk bekerja (pasal 27);
- Hak untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak dan perlindungan sosial (pasal 28);
- Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik (Pasal 29);
- Hak untuk berperan dalam kegiatan budaya, rekreasi, hiburan dan olah raga (pasal 30).

Meskipun selama ini kaum disabilitas masih sedikit menikmati hak politik. Di pemilu, jangankan afirmasi berbentuk kuota keanggotaan partai, pencalonan atau kursi, jaminan akses memilih saja tidak diperhatikan oleh banyak pihak

Padahal terkait hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik, Pasal 29 mengatur bahwa Negara-Negara Pihak harus menjamin kepada penyandang disabilitas hak-hak politik dan kesempatan untuk menikmati hak-hak tersebut atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya dan akan mengambil langkah-langkah untuk:

- a) Menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih, antara lain dengan:
 - i. Memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan bahan-bahan pemilihan bersifat layak, dapat diakses serta mudah dipahami dan digunakan;
 - ii. Melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia dalam pemilihan umum dan referendum publik tanpa intimidasi dan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan serta melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan, dengan memanfaatkan penggunaan teknologi baru yang dapat membantu pelaksanaan tugas;
 - iii. Menjamin kebebasan berekspresi dan keinginan penyandang disabilitas sebagai pemilih dan untuk tujuan ini, bilamana diperlukan atas permintaan mereka, mengizinkan bantuan dalam

pemilihan oleh seseorang yang ditentukan mereka sendiri.

- b) Secara aktif memajukan lingkungan di mana penyandang disabilitas dapat secara efektif dan penuh berpartisipasi dalam pelaksanaan urusan publik tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya serta mendorong partisipasi mereka dalam urusan publik, mencakup:
 - i. Partisipasi dalam organisasi non-pemerintah dan asosiasi yang berkaitan dengan kehidupan publik dan politik negara serta dalam kegiatan dan administrasi partai politik;
 - ii. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas untuk mewakili penyandang disabilitas di tingkat internasional, nasional, regional, dan lokal.

1.2.2 Lanjut Usia (Lansia)

Menjadi tua merupakan suatu fase kehidupan yang dialami oleh setiap manusia. Makin panjang usia seseorang, sejalan dengan penambahan usia tubuh akan mengalami kemunduran secara fisik maupun psikologis. Organ lansia akan terlihat dari kulit yang mulai keriput, berkurangnya fungsi telinga dan mata, tidak dapat bergerak cepat lagi, cepat merasa lelah, rambut menipis dan memutih, serta mudah terserang penyakit karena daya tahan tubuh berkurang.

Kecemasan akan tanda-tanda garis dan kerutan wajah serta gurat selulit telah menjadi fenomena masyarakat kontemporer dalam menghadapi perubahan atas wacana tentang tubuh. Mereka cemas pada diri mereka sendiri yang dikenali sebagai tubuh, yakni diri yang kasat mata. Banyak orang yang menerima “tua” sebagai hakikat. “Tua” akhirnya terartikulasikan sebagai sebuah kontinuitas bertambahnya usia, perubahan jasmani yang ditandai dengan berkurangnya daya diri, yang diterima sebagai proses alamiah bertumbuh-kembangnya manusia dalam melintasi fase hidup sebagai bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua.

Wacana yang berkaitan dengan persoalan “tua, menjadi tua dan kelompok orang tua” seperti tenggelam dalam propaganda iklan estetika wajah dan performa vitalitas. Tua, kemudian hadir sebagai konstruksi diskriminasi, prasangka, stereotip yang terselubung, serta mengisolasi ke dalam kelompok sosial dengan sebutan minoritas.

Secara psikologis lansia menjadi mudah lupa, serta berkurangnya kegiatan dan interaksi (baik dengan keluarga maupun lingkungan sekitarnya), mengalami rasa kesepian, kebosanan dan sebagainya. Apalagi jika kehilangan pekerjaan, menderita *post power syndrome*, berkurangnya peranan dalam keluarga atau

masyarakat, atau kondisi ekonominya memburuk.

Kebijakan pemerintah seputar lanjut usia telah dilakukan dengan penerbitan Undang-Undang Kesejahteraan Lansia No.13 tahun 1998. Di dalam Undang-undang itu disebutkan, yang termasuk kategori kelompok lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas. Dalam Undang-undang yang sama, lanjut usia dibagi kedalam dua kelompok, yaitu lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial. Lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau Jasa. Sementara lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya tergantung pada bantuan orang lain.

Jika dilihat dari kelompok umur, Badan Pusat Statistik (BPS) membagi pengelompokan lansia, yakni lansia muda (60-69 tahun), lansia madya/menengah (70-79 tahun), dan lansia tua (80 tahun keatas). Disamping itu ada juga kategori pra-lansia yaitu kelompok umur 45-54 tahun dan 55-59 tahun. Sedangkan WHO membagi lanjut usia menurut tingkatan umur lansia, yaitu: 1) Usia pertengahan (*middle age*) antara 45-59 tahun ; 2) Usia lanjut (*elderly*) 60-70 tahun; 3) Usia lanjut (*old*) antara 75-90 tahun , 4) Usia sangat tua (*very old*) di atas 90 tahun.

Suatu negara dikatakan berstruktur tua, jika mempunyai populasi lansia di atas tujuh persen (Soewono, 2009). Bila merujuk pada ukuran tersebut, maka Indonesia saat ini sudah termasuk negara berstruktur tua. Karena berdasarkan data Susenas 2013, dapat dilihat bahwa persentase lansia yang telah mencapai 8,05 % dari keseluruhan penduduk.

Struktur penduduk yang menua tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian pembangunan manusia secara global dan nasional yang ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup. Hal itu berkaitan dengan adanya perbaikan kualitas kesehatan dan kondisi sosial masyarakat yang meningkat. Dengan demikian, peningkatan jumlah penduduk lanjut usia menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan sekaligus sebagai tantangan dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2013, jumlah lansia di Indonesia mencapai 20,04 juta orang atau sekitar 8,05 % dari seluruh penduduk Indonesia. Menurut jenis kelamin, jumlah lansia perempuan yaitu 10,65 juta orang (8,61 % dari seluruh penduduk perempuan), lebih banyak dari pada lansia laki-laki yang sebesar 9,38 juta orang (7,49 % dari seluruh penduduk laki-laki). Dilihat dari tipe daerah, jumlah lansia yang tinggal di pedesaan lebih besar dibandingkan dengan yang tinggal di perkotaan. Lansia yang tinggal di pedesaan sebanyak 10,78 juta orang (8,67 %) sedangkan lansia yang tinggal di perkotaan 9,26 juta orang (7,43 %).

Akibat penurunan angka kelahiran dan makin tingginya angka harapan hidup penduduk Indonesia,

jumlah lansia pun meningkat, yang berarti angka ketergantungan lansia juga meningkat. Angka rasio ketergantungan lansia pada tahun 2013 sebesar 12,72 %. Meningkat dibandingkan tahun 2012. Sementara itu dilihat dari sisi pendidikan, lansia di Indonesia saat ini umumnya sangat kurang pendidikannya.

Di tahun 2013 hampir 84 % lansia masih berpendidikan rendah yaitu SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah sebesar 25,17%, tidak tamat SD 32,59 % dan 25,72 % tamat SD). Dari aspek kesehatan, salah satu indikator derajat kesehatan adalah angka kesakitan. Angka kesakitan lansia tahun 2013 sebesar 24,80 %, artinya bahwa setiap 100 orang lansia terdapat 25 orang yang mengalami sakit. Bila dilihat perkembangannya, angka kesakitan lansia mengalami penurunan. Tahun 2011 sebesar 27,95 %, tahun 2012 menjadi 26,83 %.

Hasil sakernas tahun 2013 memperlihatkan bahwa dari keseluruhan lansia, sebesar 46,33 % diantaranya masih bekerja. Proporsi bekerja penduduk laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan. Sebanyak 63,34 % lansia laki-laki yang bekerja lebih besar dari pada lansia perempuan yang bekerja sebanyak 31,23 %. Partisipasi penduduk dalam kegiatan ekonomi dapat dilihat dari nilai tingkat partisipasi angka kerja (TPAK). TPAK tahun 2013 sebanyak 46,58 %. Menurut jenis kelamin, 63,72 % dibanding 31,37 %. Bekerja di sektor pertanian 60,93 %, sektor perdagangan 18,23 %, jasa 7,51 %, industri 7,23 % dan sektor lainnya 6,10 %.

Distorsi kebijakan dalam bentuk pembatasan usia kerja produktif (pensiun), pembatasan usia untuk pemberian jaminan asuransi kesehatan merupakan manifestasi diskriminasi secara struktural oleh penguasa yang harus diterima oleh masyarakat seperti tanpa syarat. Diskriminasi ini harus dilawan dengan penegakan hak-hak minoritas, termasuk diantaranya hak bagi kaum lansia

Bila dilihat dari status pekerjaan, sebagian besar lansia bekerja dengan status berusaha/bekerja dibantu buruh sebesar 42,11 %, berusaha sendiri 25,66 %, pekerja tidak dibayar 13,16 %, pekerja bebas 10,39 % dan pekerja lansia sebagai buruh/karyawan sebesar 8,68 %. Dilihat dari jam kerja, sebanyak 40,13 % bekerja lebih dari 35 jam dalam seminggu. Sebanyak 39,05 % bekerja antara 15 hingga 35 jam, dan 20,82 % bekerja kurang dari 15 jam seminggu. Sementara itu dilihat dari tempat tinggal, pada tahun 2013 persentase lansia yang tinggal di rumah tidak layak huni sebesar 5,71 %, di rumpah hampir tidak layak huni sebesar 12,48 % dan di rumah layak huni sebesar 81,81 %.

Fenomena penuaan penduduk menimbulkan permasalahan yang dihadapi suatu negara karena faktor usia dan biologis, sehingga perlu diperhatikan adanya bantuan dan perlindungan diberbagai bidang sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia agar diberikan haknya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan

fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia.

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia diatur mengenai hak-hak lansia. Hak-hak tersebut meliputi: a) pelayanan keagamaan dan mental spiritual; b) pelayanan kesehatan; c) pelayanan kesempatan kerja; d) pelayanan pendidikan dan pelatihan; e) kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum; f) kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum ; g) perlindungan sosial; h) bantuan sosial.

Bab 2

B_Trust dan Pemilu yang Inklusif

2.1 B_Trust, Dari Bandung untuk *Re-Building Public Trust*

B_Trust adalah organisasi nirlaba yang berpusat di Kota Bandung. Pilihan nama organisasi yang didirikan pada bulan Juni 2001 oleh sejumlah pegiat pemberdayaan masyarakat ini dilatar belakangi oleh konteks sosial politik yang mewarnai masa transisi paska lengsernya Soeharto.

Distrust seperti menjadi kata kunci untuk menggambarkan situasi pada saat itu. Kekecewaan atas praktek rekayasa politik, ekonomi dan sosial yang dijalankan dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto selama berpuluh-puluh tahun telah membawa dampak pada mudurnya, untuk tidak disebut menghilangnya, sikap saling percaya. Baik antar masyarakat terhadap berbagai insititusi pemerintahan dan politik maupun antar kelompok masyarakat dan antar institusi dalam pemerintahan itu sendiri.

Tentu situasi tersebut harus segera dipulihkan. Karena ‘kepercayaan’ antar pihak merupakan fondasi bagi upaya pembangunan kembali tatanan sosial, ekonomi dan politik yang menjadi agenda utama reformasi. Atas dasar keinginan yang kuat untuk turut berkontribusi pada pembangunan kembali (*re-building*) sikap saling percaya ini, maka diinisiasi sebuah organisasi yang kemudian disematkan nama yang merepresentasi maskud dan tujuan pembangunannya. Yaitu B_Trust sebagai kependekan dari *Be Trust* atau *Re-Building Public Trust for Governance*.

Dalam konteks itu, salah satu aspek yang cukup vital dalam upaya pembangunan kembali 'kepercayaan' di tengah-tengah kehidupan publik adalah informasi. Sehingga, upaya untuk mendorong terciptanya praktek keterbukaan dan transfer informasi secara kredibel dan bertanggung jawab antara para pihak yang berkepenting dalam urusan-urusan publik menjadi salah satu fokus utama B_Trust.

Bergerak dari aspek inilah pembangunan demokrasi dan ekonomi yang inklusif akan menemukan arahnya. Karena demokrasi dan ekonomi yang inklusif sangat tergantung pada seberapa tinggi derajat saling percaya antara insitusi pemerintahan, politik dan komunitas-komunitas dalam masyarakat itu sendiri sebagai alas bagi konsolidasi kepentingan dan pembangunan konsensus bersama.

2.2 Membangun Kesetaraan Berpolitik dalam Pemilu

Sebagai bentuk kontribusi dalam kerangka mewujudkan tujuan pembentukannya, B_Trust menentukan fokus pada upaya-upaya penguatan pemenuhan hak-hak politik kelompok masyarakat yang dimarjinalkan dalam relasi-relasi sosial, ekonomi dan politik. Diantaranya adalah penguatan upaya-upaya untuk penghargaan, pengakuan dan pemenuhan hak-hak politik kelompok masyarakat penyandang disabilitas dan lansia marjinal. Oleh karena itu, sejak pendiriannya, B_Trust terlibat aktif dalam berbagai kerja pendidikan, diseminasi informasi, pemberdayaan ekonomi dan advokasi kebijakan bersama dengan penyandang disabilitas dan lansia.

Salah satu bentuk dari pengejawantahan pada fokus tersebut adalah upaya-upaya untuk membangun kesetaraan dalam politik pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (pemilu). Hal ini ditunjukkan oleh keterlibatan B_Trust sejak Pemilu 2009 dalam kerja-kerja pendidikan, diseminasi informasi untuk penyandang disabilitas dan lansia.

Pembelajaran dari program B_Trust pada tahun 2009 yang bekerjasama dengan UNDP berkaitan dengan diseminasi pemilihan dan pencerdasan pemilih untuk lansia marginal dan penyandang disabilitas di 5 kota/kabupaten di Jawa Barat menunjukkan beberapa penemuan penting sebagai berikut:

1. Penyandang disabilitas dan lansia menemukan kendala dalam akses informasi pemilihan dan akses pada hari pemilihan dalam aspek berikut: lokasi dan jarak (TPS terletak jauh dari rumah mereka), waktu (untuk kalangan marginal, waktu cenderung lebih diutamakan untuk bekerja ketimbang mengikuti pemilihan), fasilitas-fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas (tuna netra, tuna rungu, dan penyandang disabilitas fisik lainnya) dan lansia tidak disediakan; prosedur pemilihan (memberikan tanda centang pada daftar nama yang panjang pada suatu kertas suara sulit dilakukan bahkan oleh orang pada umumnya, terlebih untuk penyandang disabilitas tuna netra).

2. Lansia marginal dan penyandang disabilitas adalah kelompok yang paling sering diterlantarkan oleh pihak berwenang dan pihak terkait lain. Pada kenyataannya, penyandang disabilitas membentuk hampir 15 % dari populasi total dengan setengah di antara mereka berpotensi menjadi pemilih. Sementara itu, lansia adalah 10 % dari populasi total dan juga merupakan pemilih prospektif.
3. Teridentifikasi bahwa sebagian besar lansia yang tinggal dalam panti jompo tidak terdaftar sebagai pemilih; sementara itu, 40 % pemilih prospektif dari kalangan penyandang disabilitas juga tidak terdaftar.

Program pencerdasan pemilih B_Trust pada Pemilu 2009 tersebut, dinilai telah menampilkan diseminasi pemilihan dan pencerdasan pemilih yang efektif untuk masyarakat lansia dan penyandang disabilitas dengan menggunakan pendekatan praktik terbaik seperti kunjungan dari rumah ke rumah dan kunjungan kelompok komunitas (melibatkan longser penyandang disabilitas).

Evaluasi melibatkan beragam pihak terkait dari kelompok sasaran dan penerima hasil seperti lansia marginal dan penyandang disabilitas, beserta keluarganya, dalam 5 kota/kabupaten, organisasi penyandang disabilitas di tiap kota/kabupaten, CSO setempat, pemerintah daerah, MoHA, KPU, dan media, mendorong kami untuk melaksanakan program serupa untuk pemilihan umum 2014, dengan cakupan daerah sasaran yang lebih luas, aspek program yang lebih dalam, dan durasi lebih panjang. Program kami juga terdokumentasi dengan baik oleh UNDP sebagai praktik terbaik dalam implementasi dana pada pemilihan umum 2009.

Atas dasar pengalaman dan pembelajaran tersebut, B_Trust kembali melakukan upaya dengan tujuan yang sama pada Pemilu 2014. Bekerja sama dengan Uni Eropa, B_Trust memperluas ruang lingkup jangkauan programnya, dari semula terfokus pada 5 kota/kabupaten menjadi 26 kota/kabupaten di Jawa Barat. Fokus kewilayahan ini mengingat Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010, sebagaimana tertulis pada Profil Provinsi Jawa Barat 2011, populasi Jawa Barat pada tahun 2009 adalah 42.194.869 orang dan jumlah pemilih pada pemilihan umum 2009 mencapai 30,118,380. Populasi penduduk pada tahun 2014 diperkirakan akan mencapai 45,554,907 orang dengan jumlah pemilih prospektif 32,134,431 orang sebagaimana tertulis pada tabel 1.

Tabel 1
Perbandingan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2009 dan
Perkiraan Partisipasi dalam Pemilu 2014

2009		2010	2011	2012	2013	2014	
Pemilih	Populasi	Populasi	Populasi	Populasi	Populasi	Pemilih	Populasi
30,118,380	42,194,869	43.110.195	43.714.873	44.349.549	44.952.432	32.134.431	45.554.907

Diadaptasi dari Profil Provinsi Jawa Barat 2011

Berdasarkan data yang diperoleh dari Departemen Sosial Provinsi Jawa Barat (Juli 2012), hingga Desember 2011, jumlah penyandang disabilitas yang termarginalisasi (penyandang disabilitas fisik, tuna netra, dan tuna rungu) di Jawa Barat telah mencapai 100,548. Jumlah ini terdistribusi secara berbeda dari suatu kota/kabupaten dengan yang lain. Sementara itu populasi lansia menunjukkan peningkatan signifikan dari hanya 3,668,870 orang pada tahun 2010 menjadi 4,367,270 orang pada tahun 2014.

Disayangkan, jumlah ini tidak berimbang dengan jumlah pencerdasan pemilih yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU memiliki anggaran dan kemampuan yang sangat terbatas untuk melaksanakan sosialisasi pemilihan untuk semua elemen masyarakat. Dalam wawancara dengan pihak KPU Jawa Barat, diakui bahwa sosialisasi untuk pemilihan umum 2014 belum lengkap dan belum memadai untuk mencapai semua pemilih wanita, pemilih baru, dan pemilih dari kalangan marginal pada semua tingkat.

Mereka hanya memusatkan perhatian pada sosialisasi untuk kalangan umum melalui pendekatan yang umum tanpa mempertimbangkan kekurangan pemilih prospektif dari berbagai kalangan, terutama kalangan lansia marginal dan penyandang disabilitas. Meski harus diakui, sebelum Pemilu 2004, kaum disabilitas banyak yang dinilai penyelenggara sebagai warga yang tak layak memilih. Disabilitas netra disikapi petugas TPS dengan pendamping. Asas "Rahasia" dari LUBER tak terpenuhi. Bahkan sering dijadikan tontonan bercanda.

Oleh karena itu, peran CSO dan pihak terkait lain seperti B_Trust dalam mengakomodasikan kebutuhan mereka yang patut diperhatikan dalam memastikan keberlangsungan hak demokratis sangat dihargai dan didukung.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) turut menyatakan, bahwa salah satu faktor yang berpengaruh pada tren penurunan tingkat partisipasi pemilih yang meningkat, adalah akses terbatas terhadap informasi akurat

berkaitan dengan pemilihan, partai politik, demokrasi, hak pilih, prosedur pemilihan, dan bahkan TPS. LSI memperkirakan, penurunan partisipasi pemilih akan secara signifikan meningkat pada pemilihan umum 2014 setelah tren peningkatannya dari pemilihan legislatif 1999 (6.3 % tidak hadir) menjadi 16 % pada tahun 2004, dan naik menjadi 29.1 % pada tahun 2009.

Program B_Trust pada Pemilu 2014 yang bertajuk ‘Meminimalkan Sifat Apatis dari Kelompok Lansia Marjinal dan Penyandang Disabilitas melalui Pendidikan Kewarga negaraan dan Program Diseminasi Pemilihan untuk Pemilihan Umum 2014 di Indonesia’, bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keturut sertaan kelompok marjinal (lansia dan penyandang disabilitas), melalui keterlibatan aktif CSO (Organisasi Masyarakat Sipil) setempat, dalam keberlangsungan pemilihan dan pencerdasan pemilih menuju demokrasi yang terkonsolidasi.

Tujuan utama tersebut akan dicapai melalui dua tujuan khusus sebagai berikut: (i) Untuk meningkatkan keturut sertaan lansia marginal dan penyandang disabilitas pada Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden 2014; dan (ii) Meningkatkan kesadaran dan kemampuan CSO setempat dalam mengadvokasikan hak demokratis melalui pendidikan kewarga negaraan berbasis kebutuhan lansia marginal dan penyandang disabilitas.

Melalui pelaksanaan program ini diharapkan dapat memenuhi tiga pencapaian utama, yaitu: (i) Lansia marginal dan penyandang disabilitas di Jawa Barat terkabari dan terdidik dengan baik dalam perihal proses pemilihan dan pencerdasan pemilih; (ii) jumlah lansia marginal dan penyandang disabilitas yang turut serta dalam pemilihan umum legislatif dan presiden 2014 meningkat; dan (iii) kemampuan CSO dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program diseminasi informasi dan pencerdasan pemilih meningkat demi pemilihan yang efektif, transparan dan partisipatif.

Program pencerdasan pemilih dan diseminasi pemilihan untuk penyandang disabilitas, dipusatkan dalam 9 kota/kabupaten, yakni 8 kota/kabupaten dengan populasi penyandang disabilitas terbesar selain Kota Bandung, yang menampung sebagian besar organisasi penyandang disabilitas seperti Pertuni, BILIC, HPWCI, dan lainnya, serta sekolah untuk penyandang disabilitas.

Populasi penyandang disabilitas gabungan dalam kesembilan kota/kabupaten tersebut adalah 60,699. Populasi terbesar dimiliki Kabupaten Indramayu (11,234), Kabupaten Cirebon (10,218), Kabupaten Sumedang (6,423), Kabupaten Ciamis (5,870), Kabupaten Garut (5,868), Kabupaten Tasikmalaya (5,726), Kabupaten Bandung (5,528), and Kota Bandung (4,071).

Tabel 2
Data Penyandang Disabilitas di Jawa Barat

No	Kabupaten/Kota	Penyandang Disabilitas	Tuna Netra	Tuna Rungu	Total
1	Kab. Subang	4,580	420	761	5,761
2	Kab. Cirebon	7,595	1,293	1,330	10,218
3	Kab. Indramayu	11,234			11,234
4	Kab. Bandung	5,528			5,528
5	Kab. Garut	4,609	1,048	211	5,868
6	Kab. Tasikmalaya	3,171	1,188	1,367	5,726
7	Kab. Ciamis	3,120	1,233	1,517	5,870
8	Kab. Sumedang	4,011	708	1,704	6,423
9	Kota Bandung	2,295	851	925	4,071
	Total	46,143	6,741	7,815	60,699

Sumber: Profil Jawa Barat 2011

Secara khusus, kegiatan ini bertujuan memberi informasi kepada dan mendidik sebanyak mungkin penyandang disabilitas di 9 kota/kabupaten di Jawa Barat yang disebutkan di atas. Hal ini diharapkan mengarah pada peningkatan taraf partisipasinya dalam pemilihan umum legislatif dan presiden 2014. Melalui program ini, keadaan dan kemampuan teknis penyandang disabilitas akan meningkat dalam beberapa aspek:

1. Sikap, perilaku, dan pengetahuan penyandang disabilitas yang akan menstimulasi dan mengkonsolidasi demokrasi
2. Pengetahuan yang meningkat sebagai seorang warga negara yang sah dan pemilih yang cerdas sehingga dapat memilih dengan pengetahuan atas tanggal, waktu, dan tempat pemilihan, jenis pemilihan, dokumen identitas yang dibutuhkan untuk menjadi pemilih yang sah, pendaftaran, dan mekanisme pemilihan.
3. Peningkatan kesadaran akan peran, tanggung jawab dan hak pemilih, bahwa pilihan mereka

diperhitungkan, dan pilihan mereka dirahasiakan.

4. Para penyandang disabilitas siap di tempat pemungutan suara dan memilih, menerima hasil pemilihan umum, dan dapat menoleransi adanya kompetisi dan oposisi, dengan damai.

Kelompok sasaran kedua adalah lanjut usia. Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, kelompok lansia marginal adalah warga senior berusia di atas 60 tahun, yang telah ditelantarkan haknya, miskin, dan berhadapan dengan kesukaran akses untuk mempergunakan hak demokratisnya. Kemampuan fisik mereka untuk mengakses pemilihan, taraf pemahaman mereka dan kemampuan fisiknya untuk melihat, mendengar, dan menyerap pengetahuan telah menurun. Namun, jika mereka memiliki akses lebih baik terhadap informasi, mereka akan menyebarkan informasi tersebut kepada anak-anak mereka.

Tidak hanya itu, mereka juga akan menyebarkannya pada keluarga besar mereka. Selain itu, kemampuan, kompetensi dan pengetahuan mereka yang meningkat akan membuat mereka lebih disegani oleh keluarga besar dan rekan-rekannya. Efek lipat ganda dalam diseminasi dan pencerdasan pemilih ini akan memainkan peran yang besar. Jumlah masyarakat lanjut usia di Jawa Barat (Desember 2011) mencapai angka 3,823,720 di tahun 2011 dan diprediksi akan mencapai 4,367,270 di tahun 2014.

Tabel 3
Proyeksi Pertumbuhan Populasi Berdasarkan Kelompok Usia
di Jawa Barat 2010 – 2014

Kelompok Usia	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
60 - 64	1,355,810	1,427,830	1,498,960	1,569,990	1,639,560
65 - 69	924,190	975,490	1,032,920	1,093,070	1,153,980
70 - 74	685,120	683,660	693,410	714,060	744,350
(+) 75	703,750	736,740	768,250	798,970	829,380
Jawa Barat	3,668,870	3,823,720	3,993,540	4,176,090	4,367,270

Sumber: Profil Provinsi Jawa Barat 2011

Pencerdasan pemilih dan diseminasi pemilihan untuk kelompok lansia marginal akan dilaksanakan dalam 17 kota/kabupaten (9 kabupaten dan 8 kota). 17 kota/kabupaten tersebut memiliki populasi lansia gabungan sebesar 2,531,001. Populasi terbesar dimiliki oleh Kab Bogor 456,948, Kab Sukabumi 227,189, Kab Cianjur 232,826, Kab Karawang 216,173, Kab. Bekasi 219,255, dan Kota Bekasi 222,409. Kami juga akan mengadakan kegiatan serupa di Kota Bandung, kota yang menjadi letak LLI (Lembaga Lansia Indonesia) Jawa Barat.

Tabel 4
Proyeksi Populasi di Jawa Barat 2010 – 2014

Kabupaten/Kota		2010	2011	2012	2013	2014	Populasi Lansia 2014
1		2	3	4	5	6	
	Kabupaten						
1	Bogor	4,463,286	4,539,037	4,614,247	4,690,044	4,766,418	456,948
2	Sukabumi	2,293,123	2,312,456	2,331,720	2,350,871	2,369,809	227,189
3	Cianjur	2,265,454	2,297,050	2,362,025	2,395,100	2,428,599	232,826
4	Kuningan	1,165,441	1,180,616	1,195,600	1,210,589	1,225,568	117,493
5	Majalengka	1,242,922	1,255,839	1,268,905	1,282,119	1,295,462	124,194
6	Purwakarta	827,462	840,185	852,865	865,501	878,101	84,182
7	Karawang	2,123,512	2,156,115	2,188,949	2,221,947	2,254,895	216,173
8	Bekasi	2,156,564	2,189,064	2,221,733	2,254,391	2,287,046	219,255
9	Bandung Barat	1,550,532	1,571,039	1,590,854	1,610,756	1,630,707	156,333
	Kota						
10	Bogor	979,230	995,329	1,011,371	1,027,216	1,042,772	99,969
11	Sukabumi	319,037	323,445	327,851	332,216	336,495	32,259
12	Cirebon	338,832	343,992	349,146	354,288	359,374	34,453
13	Bekasi	2,193,585	2,225,401	2,257,244	2,288,867	2,319,948	222,409
14	Depok	1,570,947	1,605,509	1,639,639	1,673,315	1,706,474	163,597
15	Cimahi	595,029	603,493	611,761	619,879	627,853	60,191
16	tasikmalaya	640,195	649,809	659,359	668,823	678,156	65,014

17	Banjar	181,736	184,601	187,444	190,289	193,144	18,516
Jawa Barat		24,906,887	25,272,980	25,670,713	26,036,211	26,400,821	2,531,001

Sumber: Profil Provinsi Jawa Barat 2011

2.3 Pilihan Pendekatan dan Strategi

Kalangan penyandang disabilitas dan lansia adalah kelompok terpinggirkan dalam masyarakat, yang tidak pernah mendapat perhatian memadai dari Pemerintah Indonesia dan dari masyarakat. Bahkan, dalam pemberian informasi pemilihan, KPU hanya memusatkan perhatiannya pada masyarakat umum untuk pemilihan umum 2014.

Kemampuan fisik mereka untuk mengakses pemilihan, taraf pemahaman mereka dan kemampuan fisiknya untuk melihat, mendengar, dan menyerap pengetahuan tentu berbeda dari orang pada umumnya. Baik lansia marginal dan penyandang disabilitas dalam program ini membutuhkan pendekatan berbeda yang peka terhadap kebutuhan dan kemampuan mereka. Pendekatan ini disebut “pendekatan personal berbasis kebutuhan”.

Berdasarkan tempat tinggalnya, lansia marginal dan penyandang disabilitas dikategorikan ke dalam dua kelompok: mereka yang tinggal dalam suatu rumah bersama keluarganya; dan mereka yang tinggal bersama kelompok yang sama, seperti dalam panti jompo, sekolah luar biasa atau hunian untuk penyandang disabilitas, dst. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dibagi menjadi dua, yakni strategi kunjungan pintu ke pintu dan strategi kunjungan kelompok komunitas.

Yang dimaksud dengan strategi kunjungan pintu ke pintu adalah kunjungan dari rumah ke rumah para penyandang disabilitas dan lansia. Sementara, strategi kunjungan komunitas berarti kami akan mengadakan diseminasi dan pencerdasan pemilih bagi penyandang disabilitas dan lansia yang tinggal dalam satu kelompok di panti jompo, sekolah luar biasa, atau hunian penyandang disabilitas, dst. menggunakan longser atau pengajian sebagai medium penyampaian.

Karakteristik dari penyandang disabilitas adalah bahwa mereka cenderung menilai diri rendah, bersifat *introvert*, sulit beradaptasi, mudah dipengaruhi, dan emosional. Untuk mendampingi sifat-sifat ini, metode yang sesuai akan menggunakan triangulasi dari gambar atau media visual untuk tuna rungu; narasi dan media taktil (sentuhan) untuk tuna netra; permainan peran atau diskusi bagi semua kelompok; media cetak, media audio visual, longser, pengajian dan interaksi tatap muka.

Sementara itu, karakteristik dari lansia, meskipun mereka telah lanjut usia, banyak dari mereka tetap aktif berkegiatan dalam bidang pekerjaannya, kegiatan sosial, dll. dan dapat menjalankan kegiatan sehari-hari mereka. Sebagian besar dari mereka memiliki pemahaman rendah terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, mereka memiliki kebiasaan harian khusus untuk perihal bangun, beristirahat, dan tidur.

Oleh karena itu, pendekatan dan penetapan waktu diseminasi dan pencerdasan pemilih bagi lansia harus mengakomodasi sifat-sifat di atas. Metode diseminasi dapat melibatkan: gambar, narasi, diskusi, permainan peran, media cetak, media audio visual, longser, pengajian, interaksi tatap muka.

Langkah-langkah teknik dan strategi kunjungan rumah ke rumah bagi penyandang disabilitas dan lansia relatif serupa, yaitu sebagai berikut:

- Berkoordinasi dengan RW/RT, memastikan bahwa penyandang disabilitas dan lansia telah terdaftar.
- Melaksanakan diseminasi dan pencerdasan pemilih kepada pejabat berwenang dalam lingkungan sekitar, seperti Ketua RT, Ketua RW, Hansip, Lurah, Camat agar mereka tahu akan kegiatan yang kami lakukan dan juga bertujuan memperoleh dukungan mereka atas penyampaian program.
- Senantiasa meminta dukungan dari anggota keluarga para penyandang disabilitas/lansia dan menanamkan pengertian kepada mereka agar mereka mendukung anggota keluarga mereka yang menyandang disabilitas/lanjut usia pada tanggal pemilihan,
- Mempergunakan metode/teknik yang disesuaikan bagi tiap individu dan menarik, menggunakan bahasa setempat dan bahasa yang sederhana dan berperan sebagai bagian dari keluarga mereka,
- Memberikan panduan tentang pemilihan dalam bentuk buku, brosur, poster dan bentuk informasi lainnya yang akan membantu kelompok sasaran kami memahami dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan,
- Dengan sopan, mendeskripsikan wujud kertas suara dan cara menandai kertas suara dengan benar, memberi tahu cara menandai kertas suara yang benar dan salah, dan meminta mereka mencoba melakukannya sendiri,
- Meningkatkan kepercayaan diri mereka dengan memotivasi mereka untuk mempergunakan hak demokratis mereka.
- Sebagai tambahan, bagi tuna rungu, diperlukan fasilitator tambahan yang mampu menggunakan bahasa isyarat.

Bab 3

Menggalang Dukungan dan Mengorganisir Relawan

Program yang dijalankan B_Trust ini tentu saja membutuhkan dukungan yang kooperatif dari pihak-pihak terkait di tingkat lokal dan nasional (pemerintah daerah, KPU). Baik untuk menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan, sebagaimana akses dan izin untuk melaksanakan program tersebut, maupun dukungan logistik, jaringan dan otoritas yang dapat memperlancar pelaksanaan berbagai kegiatan.

Diantara pihak yang perannya cukup vital adalah pemerintah daerah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemerintah daerah dan KPU memiliki beberapa fungsi dan tanggung jawab berkaitan dengan pemilihan umum dan demokrasi. Beberapa diantaranya adalah menciptakan suasana pemilihan umum yang adil, bebas, rahasia, jujur, mendidik dan berperi kemanusiaan; meningkatkan kualitas implementasi pemilihan umum yang bersih, efisien, dan efektif; dan meningkatkan kesadaran berpolitik masyarakat sipil agar berpartisipasi secara aktif dalam pemilihan umum demi tercapainya masyarakat sipil yang demokratis. Meski demikian, sebagian besar dari tanggung jawab tersebut belum tercapai karena satu dan lain hal.

Sebaliknya, melalui program ini, KPU dan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat akan memperoleh keuntungan atas bantuan yang diperolehnya dalam melaksanakan diseminasi dan pencerdasan pemilih bagi kelompok penyandang disabilitas, lanjut usia, keluarga dan rekan-rekan mereka dengan bantuan LSM setempat, LLI Jawa Barat, organisasi-organisasi penyandang disabilitas, pelajar, aktivis posyandu, dll.

Praktik terbaik dan pembelajaran yang didapat dari program ini, seperti strategi unik kunjungan rumah ke rumah dan kelompok komunitas melalui seni longser atau pengajian, akan memperkaya pendekatan dalam pencerdasan pemilih di masa yang akan datang. KPU juga akan memiliki pemahaman yang lebih baik atas berbagai tantangan yang benar-benar dihadapi oleh kelompok marginal (lanjut usia dan penyandang disabilitas) dalam memperoleh hak demokratis mereka.

KPU sebaiknya memuat hal ini dalam naskah kebijakan untuk strategi manajemen pemilihan umum berikutnya di seluruh Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan semua warga negara. Sebab partisipasi setiap warga negara dalam pemilu merupakan hak asasi yang harus dijunjung tinggi. Setiap warga negara berhak terlibat dalam mengambil kebijakan politik dan negara wajib melindungi hak-hak tersebut.

Meskipun dalam aturan KPU menjamin semua warga negara termasuk penyandang disabilitas, berhak memberikan suaranya dalam pemilu, kenyataannya hak berpolitik penyandang disabilitas masih dianggap ringan. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan tentang sistem, tahapan dan mekanisme pemilu mengakibatkan hak suara penyandang disabilitas rentan dimanipulasi.

Selain itu, KPU dan pemerintah dibantu untuk melaksanakan diseminasi dan pencerdasan pemilih bagi kelompok lansia marginal dan penyandang disabilitas di 26 kota/kabupaten di Jawa Barat. Dari pengalaman ini, diperoleh pembelajaran dan praktik terbaik yang dapat dipelajari sebagai referensi program pencerdasan pemilih yang diadakan oleh pemerintah di masa depan.

Sebagai langkah awal untuk menggalang dukungan dari berbagai pihak, diselenggarakan Workshop Sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2014 di Hotel Savoy Homman Bandung. Kegiatan ini dihadiri oleh 84 peserta yang terdiri dari 62 orang laki-laki dan 23 orang perempuan. Peserta tersebut berasal dari berbagai kalangan yang terdiri dari Pemerintahan sebanyak 12 orang, NGO sebanyak 57 orang, Perguruan Tinggi sebanyak 6 orang dan dari kalangan media sebanyak 10 orang.

Kegiatan ini menghadirkan beberap narasumber yang kompeten dengan substansi program, yaitu: (i) Dr. Fery Kurnia Rizkiyansyah, S.IP, M.Si sebagai Komisioner KPU Pusat; (ii) Yayasan Ruhyat sebagai Ketua KPUD Jawa Barat; (iii) Budiana sebagai Pimpinan Redaksi HU Pikiran Rakyat (media cetak terbesar di Jawa Barat); (iv) Tonton sebagai Kepala Balai Pemberdayaan Penyandang Disabilitas sekaligus mewakili Kepala Dinas Sosial Jawa Barat; dan (v) Jumono selaku perwakilan penyandang disabilitas sekaligus praktisi pemberdayaan penyandang disabilitas di Jawa Barat.



Para narasumber dalam kegiatan Workshop Sosialisasi
(dok. B_Trust)

Melalui pelaksanaan kegiatan ini yang dilanjutkan dengan pendekatan-pendekatan secara langsung pada setiap pihak, diperoleh beberapa hal penting yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program ini, antara lain:

1. Adanya pernyataan dukungan positif dari pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan program ini, seperti dari KPU Pusat, KPU Jawa Barat, Dinas Sosial, media massa, Perguruan Tinggi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian dan fokus sesuai dengan misi program ini;
2. Terumuskannya pengayaan secara substansi mengenai kondisi dan dinamika sosial-politik di Jawa Barat sebagai konteks wilayah dimana program ini dilaksanakan;
3. Terumuskannya pengayaan substansi terkait dengan pendekatan dan strategi untuk menjalankan berbagai kegiatan dalam lingkup program ini sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
4. Rencana pelaksanaan program telah tersosialisasikan ke berbagai kalangan melalui kehadiran peserta yang mewakili berbagai pihak baik dari kalangan pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, komunitas-komunitas yang menjadi target grup program. Selain itu, rencana pelaksanaan program ini juga telah dipublikasikan oleh berbagai media massa, seperti: (i) HU Pikiran Rakyat; (ii) Tribun Jabar; (iii) Koran Tempo; (iv) Kompas; (v) Seputar Indonesia; (vi) Galamedia; dan (v) peliputan khusus dari media televisi yaitu Kompas-STV;

Sejalan dengan proses penggalangan dukungan dari berbagai pihak dari tingkat pusat yang membuahkan hasil keluarnya surat rekomendasi dari KPU Pusat dan Propinsi serta Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat, proses penggalangan relawan yang akan menjadi fasilitator kegiatan pendidikan, diseminasi informasi dan advokasi di tiap kota/kabupaten pun dilakukan. Pengorganisasian relawan atau fasilitator dilakukan bermula dengan menggunakan jaringan kerja anggota tim inti yang selama ini telah memiliki pengalaman bekerjasama dengan berbagai pihak di berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat. Langkah ini dimulai sejak bulan Januari 2013.

Dengan menggunakan pola pengorganisasian relawan berbasiskan organisasi-organisasi masyarakat sipil di tingkat kota/kabupaten, pada pertengahan Februari telah terbangun kontak dan komitmen dari perwakilan-perwakilan relawan/fasilitator. Setiap kabupaten/kota dipilih satu orang untuk menjadi koordinator fasilitator. Hal ini dilakukan untuk dapat melakukan kerja-kerja pendahuluan dalam hal memperdalam *baseline study* di setiap kota/kabupaten, menggalang dukungan dari berbagai pihak di tingkat kota/kabupaten dan mengkoordinir kerja-kerja bersama fasilitator di masing-masing wilayahnya.

Setelah dilakukan penajakan kesediaan dan pembangunan komitmen, pada tanggal 18 Februari 2013 dilakukan pertemuan konsolidasi dan pembekalan untuk seluruh koordinator fasilitator di Hotel Kanira Bandung. Pertemuan ini dihadiri oleh 26 orang koordinator fasilitator dari seluruh kota/kabupaten. Proses konsolidasi dan pembekalan ini diisi oleh pengantar mengenai kelembagaan dan kesejarahan perjalanan dan landasan filosofis program B_Trust, penjelasan latar belakang dan tujuan program serta pemaparan materi mengenai hak-hak politik masyarakat dan penjelasan strategi dan mekanisme kerja.



Konsolidasi dan pembekalan bersama koordinator fasilitator (dok. B_Trust)

Tabel 5
Daftar Koordinator Fasilitator/Relawan

No	Kota/ Kabupaten	Nama Koord. Fasilitator/Relawan	Jenis Kelamin
1	Kab. Bogor	Sofian Azizi	Laki-laki
2	Kab. Sukabumi	Risma Haryani	Perempuan
3	Kab. Cianjur	Selly Nurdinah, SH, M hum	Perempuan
4	Kab. Bandung	Deni Abdullah	Laki-laki
5	Kab. Garut	Usep Ebit Mulyana	Laki-laki
6	Kab. Tasikmalaya	Syaiful Rosyid	Laki-laki
7	Kab. Ciamis	Aji Sahdi Sutisna	Laki-laki
8	Kab. Kuningan	Unik Yunia Nurtanty	Perempuan
9	Kab. Cirebon	R. Anton Budi Indrayana, ST	Laki-laki
10	Kab. Majalengka	Asep Sopandi	Laki-laki
11	Kab. Sumedang	Noviar Safari	Laki-laki
12	Kab. Indramayu	Rogibah	Perempuan
13	Kab. Subang	Heru Ginanjar	Laki-laki
14	Kab. Purwakarta	Ibnu Hikmat Airil	Laki-laki
15	Kab. Karawang	Yakub Fauzi	Laki-laki
16	Kab. Bekasi	Syaeful Mukhtar	Laki-laki
17	Kab. Bandung Barat	Yadi Sumiadi	Laki-laki
18	Kota Bogor	Vivi Harifrianti	Perempuan
19	Kota Sukabumi	Yuyu Marliah	Perempuan
20	Kota Bandung	Hari Kristanto	Laki-laki
21	Kota Cirebon	Rizal Arief	Laki-laki
22	Kota Bekasi	Ahmad Nurdin	Laki-laki
23	Kota Depok	Patimah	Perempuan
24	Kota Cmah	Atty Supriaty	Perempuan
25	Kota Tasikmalaya	Rinto Nurulsamsi	Laki-laki
26	Kota Banjar	Nurdin Suhendar	Laki-laki

Setelah mengikuti pembekalan, proses pendalaman kondisi dimasing-masing kabupaten sejak awal Maret 2013 dilakukan bersama dengan koordinator fasilitator tingkat kabupaten/kota sejak bulan Maret 2013. Setiap koordinator fasilitator melakukan komunikasi dengan instansi terkait seperti KPU dan Kantor Dinas Sosial masing-masing kabupaten, LSM dan komunitas di tingkat lokal, media dan berbagai nara sumber lainnya yang relevan. Sebagai mekanisme koordinasi, dilakukan pertemuan-pertemuan konsolidasi antara tim inti bersama koordinator fasilitator.

Pertemuan koordinasi ini dilakukan berdasarkan pembagain region, yaitu: Region D (Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi) dilakukan pada tanggal 26 Maret 2013. Region E (Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka, Kab. Indramayu) dilakukan pada tanggal 8 Maret 2013. Region F (Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kab. Cianjur, Kota Sukabumi, Kab. Sukabumi) dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2013. Region T (Kab. Karawang, Kab. Subang, Kab. Purwakarta, Kota Bekasi dan Kab. Bekasi) diselenggarakan pada tanggal 22 Maret 2013, dan region Z (Kota Tasikmalaya, Kab. Tasikmalaya, Kota Banjar, Kab. Ciamis, Kab. Garut) dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2013.



Pertemuan koordinasi yang dilakukan di Karawang (kiri) dan di Tasikmalaya (kanan) (dok. B_Trust)

Selain melakukan pendalaman kondisi di setiap kota/kabupaten serta penggalangan dukungan dan pembangunan kerja sama dengan berbagai pihak, para koordinator fasilitator tingkat kota/kabupaten juga melakukan pengorganisasian dan pembekalan tim relawan. Target masing-masing koordinator dapat merekrut sekurang-kurangnya 10 orang relawan, untuk dijadikan tim fasilitator kegiatan-kegiatan pendidikan dan diseminasi informasi. Selain dibekali berbagai materi yang disampaikan pada pembekalan tingkat propinsi, mereka juga dibekali panduan secara khusus untuk dijadikan bahan pembekalan lebih lanjut pada tim fasilitator.

Tabel 6
Panduan Kerja Koordinator Kabupaten/Kota

Tugas Pokok dan Peranan	Output	Jadwal
<p>1. Membangun relasi/ kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, diantaranya:</p>	<p>a. KPUD, dengan target untuk mendapatkan surat dukungan dari KPUD</p> <p>b. Dinas Sosial, dengan target untuk mendapatkan surat dukungan dari dinas sosial</p> <p>c. Camat, target: surat keterangan atau pengantar</p> <p>d. Lurah/Kepala Desa</p> <p>e. Organisasi-organisasi masyarakat sipil</p> <p>f. Media massa lokal</p> <p>g. Komunitas-komunitas yang menjadi kelompok target</p> <p>h. Posyandu</p> <p>i. Panti, wisma, dll</p>	<p>Maret 2013</p>
<p>2. Mengggali, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan informasi yang relevan</p>	<p>a. Data mengenai karakteristik (jumlah, sebaran, identitas, dll) penyandang disabilitas dan lansia marjinal yang paling <i>update</i> berdasarkan kecamatan sampai desa</p> <p>b. DPS dan DPT</p> <p>c. Jadwal Pemilu</p> <p>d. Monografi desa pada kecamatan yang menjadi fokus</p> <p>e. Kliping berita terkait dengan dinamika politik lokal terkait dengan Pemilu 2014</p> <p>f. Tulisan mengenai dinamika sosial politik pada kelompok target</p>	<p>Maret-April 2013</p>
<p>3. Merekrut, mendidik dan mengkoordinasikan tim fasilitator yang berjumlah 9 orang</p>	<p>a. Biodata anggota tim fasilitator masing-masing kota kabupaten;</p> <p>b. Surat pernyataan kesediaan masing-masing anggota tim;</p> <p>c. Notulensi dan dokumentasi acara-acara diskusi dan pendidikan dengan anggota tim fasilitator</p>	<p>Agustus 2013</p>

<p>4. Menyelenggarakan FGD-FGD/diskusi-diskusi yang melibatkan berbagai pihak untuk menggali informasi, mengembangkan wacana dan mempertajam strategi dan pendekatan</p>	<p>a. Absesnsi FGD b. Notulensi c. Dokumentasi</p>	<p>Maret-April 2013</p>
<p>5. Mengkoordinasikan dan melakukan diseminasi informasi dan pendidikan pemilih</p>	<p>a. Respon kuesioner hasil wawancara <i>door to door</i> b. Dokumentasi <i>community visit</i></p>	<p>Desember-Januari 2013 dan Maret-April 2014</p>

Tim fasilitator atau relawan yang terorganisir di masing-masing kota/kabupaten, kemudian menggelar putaran diskusi kelompok terfokus (FGD). Kegiatan ini bertujuan untuk: (i) mensosialisasikan kepada pada pihak di tingkat kota/kabupaten dan tokoh-tokoh masyarakat, bahwa di desanya akan dilakukan proses pendidikan pemilih dan diseminasi informasi untuk lansia atau penyandang disabilitas; (ii) menggalang dukungan dari SKPD terkait, di lingkungan pemerintah daerah, KPUD, Panwaslu, media, LSM dan organisasi-organisasi kemasyarakatan; (iii) adanya pemahaman bersama antara fasilitator dan para pihak, mengenai pendekatan dan metoda yang digunakan pada proses sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk lansia dan disabilitas.

Rangkaian kegiatan FGD dilakukan sekaligus juga sebagai kegiatan pendidikan atau pembekalan untuk pendalaman mengenai metoda dan teknik bagi para fasilitator tingkat kabupaten/kota. Kegiatan ini dimulai sejak awal bulan Oktober hingga minggu ketiga bulan November 2013, dilakukan secara maraton dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya yang dipandu oleh tim inti yang berjumlah 5 orang yang terdiri dari Sapei Rusin, Dadang Sudarja, Yani Maryani, Mateu dan Matdon.

Tabel 7
Pelaksanaan FGD di Kota/Kabupaten

No	Kota/Kabupaten	Waktu	Tempat	Peserta				
				Fasilitator		Tokoh		Media
				L	P	L	P	
1	Kota dan Kab Cirebon	2-Oct-13	Gedung Koperasi, Sindang Laut	15	5	9	2	4
2	Majalengka	3-Oct-13	JAF, Jatiwangi	10		13	2	4
3	Banjar	5-Oct-13	Kantor SHI Kota Banjar	7	3	2	1	4
4	Ciamis	7-Oct-13	Rumah Makan Anwina	6	4	3	1	6
5	Kuningan	8-Oct-13	Aula Kelurahan Kuningan	8	2	11	1	2
6	Indramayu	9-Oct-13	Rumah Makan Cibiuk	7	3	7		4
7	Sumedang	10-Oct-13	Aula Kecamatan Jatinangor	9	1	13	1	4
8	Garut	10-Oct-13	Rumah Makan Sate Buhun	7	3	3	2	4
9	Depok	16-Oct-13	Rumah Makan Gubug Sawangan	7	3	6		7
10	Kab. Bekasi	18-Oct-13	Aula Kelurahan Bantarjaya	7	3	9	1	3
11	Kab. Kerawang	21-Oct-13	Aula Desa Rengas Dengklok	9	1	25		6
12	Kab. Sukabumi	22-Oct-13	Aula Badan Diklat Kab. Sukabumi	4	6	7	1	3
13	Kota Sukabumi	23-Oct-13	Aula Kelurahan Jaya Raksa	7	3	2	1	15
14	Kab Cianjur	24-Oct-13	LBH Cianjur	9	1	9	1	7
15	Kota dan kab Bogor	25-Oct-13	Kebun Raya Bogor	15	5	2	1	2
16	Kab Subang	30-Oct-13	Aula Kecamatan Kalijati	9	1	8	4	4
17	Kab Purwakarta	4-Nov-13	Gedung Aula KPU	10		9	3	3
18	Kab Bandung Barat	7-Nov-13	Balai Desa Cililin	5	5	9	1	2
22	Kota Bekasi	11-Nov-13	Aula Kelurahan Bantar Gebang	8	2	9	1	1
19	Kota Cimahi	13-Nov-13	RM Saung Cibeureum	7	3	10	1	5
20	Kota/Kab Tasik	14-Nov-13	Pendopo Kota Tasikmalaya	18	2	3	1	17
21	Kota Bandung	19-Nov-13	Aula Kelurahan Pasir kaliki	8	2	8	2	15
23	Kab Bandung	20-Nov-13	Rumah Bali	9	1	11	1	1
Jumlah Partisipan				201	59	188	29	123

Rangkaian kegiatan FGD di seluruh kabupaten/kota ini, telah melibatkan lebih dari 600 orang baik sebagai narasumber/pemateri maupun peserta dari berbagai kalangan, seperti: KPUD, Panwas, Dinas Sosial, pemerintah tingkat kecamatan dan desa, tim fasilitator program, aktivis LSM dan Ormas, perwakilan organisasi lansia dan penyandang disabilitas dan wartawan. Melalui proses ini, diperoleh sejumlah hasil antara lain:

1. Terbangunnya komitmen dari KPUD dan Dinas Sosial untuk mendukung kerja-kerja tim fasilitator di masing-masing kabupaten/kota;
2. Adanya pengayaan dan update data dari narasumber terkait kondisi lokal yang berhubungan dengan pelaksanaan program diseminasi informasi dan pendidikan pemilih;
3. Adanya masukan pengayaan mengenai strategi, pendekatan dan teknik di lapangan sebagai bekal bagi para fasilitator;
4. Peliputan-peliputan oleh media cetak dan elektronik tingkat lokal semakin memperluas sosialisasi atas pelaksanaan program ini;



Acara Focus Group Discussion (FGD) dan Pelatihan Fasilitator yang diselenggarakan (searah jarum jam) di Kab. Sukabumi, Kab. Garut, Kab. Majalengka dan Kab/Kota Cirebon

Bab 4

Kunjungan Komunitas dan Dari Pintu Ke Pintu

4.1 Kunjungan Komunitas

Terbentuknya komunitas-komunitas atau organisasi lansia dan difabel, karena adanya perlakuan tidak adil yang dirasakan oleh mereka, perlakuan tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan tapi juga oleh negara, yang seharusnya melindungi setiap warganya tanpa terkecuali, dengan latar belakang tersebut, mendorong kaum yang termajinalkan untuk membuat komunitas-komunitas atau lembaga-lembaga yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan nyaman dengan perlakuan yang sama tanpa membeda-bedakan satu sama lain.

Juga belajar dari ketidak teraturan pemilu 2009, diharapkan pada pemilu 2014 pemerintah lebih memfokuskan upaya-upaya pemenuhan hak berpolitik penyandang disabilitas sehingga hak asasi penyandang disabilitas tidak dilanggar dan asas pemilu luber dan jurdil bisa terwujud.

Dengan banyaknya komunitas yang tersebar di kota dan kabupaten di provinsi Jawa Barat yang jarang sekali diperhatikan mengenai pendidikan dan sosialisasi pemilu, karena hanya dilakukan di perumahan atau sekolah, sehingga dipandang perlu untuk melakukan sosialisasi di komunitas-komunitas, dengan tujuan bahwa mereka dapat informasi yang sama seperti yang diperoleh oleh warga lainnya yang berada di dekat aparaturnegara.

Dengan latar belakang tersebut diatas maka B_Trust bersama Uni Eropa yang dibantu oleh 260 Fasilitator di 26 Kota/kabupaten se Jawa Barat melakukan *community visit*, sebagai salah satu pendekatan untuk memberikan pendidikan dan sosialisasi pada kelompok pemilih lansia marjinal dan disabilitas se provinsi Jawa Barat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi komunitas pemilih lansia dan disabilitas pada penyelenggaraan Pemilu 2014 mendatang.

Rangkaian kegiatan *community visit* di 26 kabupaten/kota dilaksanakan selama dua bulan, mulai dari bulan Desember 2013 sampai dengan pertengahan Februari 2014. Meskipun pada perencanaannya ditargetkan dapat selesai dilakukan dalam tempo 2 bulan, tapi pada pelaksanaannya terjadi perpanjangan waktu karena kendala-kendala yang sifatnya teknis.

Target dan sasaran *community visit* adalah panti-panti wreda, kelompok pengajian lansia, kelompok senam dan organisasi-organisasi penyandang disabilitas yang tersebar di kota/kabupaten se Provinsi Jawa Barat, dengan targetan 150 orang lansia/disabilitas pada setiap kota/kabupaten. Secara umum, pada setiap pelaksanaan *community visit*, rangkaian acara yang dilakukan antara lain:

- i. Memberikan pendidikan kepada komunitas tentang tata cara memilih pada Pemilu 2014;
- ii. Memberikan informasi umum tentang Pemilu 2014 kepada komunitas lansia dan disabilitas; dan
- iii. Membangun kesadaran para lansia dan penyandang disabilitas yang ada di komunitas mengenai peranan dan partisipasi aktif rakyat dalam Pemilu 2014. Selain itu, dilakukan juga penyebaran angket untuk diisi oleh peserta sebagai bagian dari proses identifikasi persepsi dan penguasaan informasi yang dimiliki para peserta



Penghuni Panti Wreda Karitas di Kota Cimahi melakukan simulasi pencoblosan saat kegiatan *community visit*



Fasilitator dan kelompok lansia dari Majelis Ta'lim Al-istiqomah Kota Depok berphoto bersama



Fasilitator difabel, Kang Aden melakukan pendidikan pemilih kepada siswa-siswi SLB D YPAC Kota Bandung



Siswi SLB Taruna Bakti Kab. Kuningan mengikuti simulasi pencoblosan saat kegiatan *community visit*



Kunjungan komunitas di Balai Desa Sukasari, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung barat



Penghuni panti Forum Komunikasi Difabel Cirebon (FKDC) menjadi kelompok sasaran *community visit*

Setelah melalui tahap perencanaan, penjajakan para pihak dan persiapan teknis, rangkaian kegiatan *community visit* di seluruh kabupaten/kota se-Jawa Barat berhasil dilaksanakan. Setiap kegiatan *community visit*, selain diikuti oleh kelompok sasaran, peserta juga terdiri dari tokoh masyarakat, pemerintah daerah, KPUD, fasilitator dan media elektronik, cetak lokal dan nasional. Terkait waktu, tempat dan kelompok sasaran dari pelaksanaan kegiatan pada setiap Kabupaten/Kota tersebut secara ringkas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 8
Pelaksanaan Community Visit

No	Kota / Kabupaten	Waktu	Tempat
1.	Kota Cimahi	5 ,8,13 Desember 2013	Panti Wreda Karitas,Pengajian lansia Rw 5 dan 28 di Mesjid Al Ikhlas, Mesjid jami Sabibulsalam
2.	Kab Kuningan	8, Desember 2013	SLB Taruna Mandiri, CItamba
3.	Kota Depok	16,18 Desember 2013	Ta'lim Al-Ittihad Sawangan Depok (Musholla Al-Itti-had), Majelis Ta'lim Al-Istiqomah Depok,
3.	Kab Sukabumi	21 Desember 2013	Mushola Daarus saadah
4.	Kab Bekasi	21 Desember 2013	Kp. Paderesan Desa Bantar Jaya Kec. Pembayaran
5.	Kota Sukabumi	24 Desember 2013	Halaman Mesjid Ad-Dakwah, Jl. WidyaKrama Rt. 1 Rw 4, Balandongan
6.	Kota Bekasi	28 Desember 2013	Rumah Tokoh Masyarakat, Kelurahan Rawa Lumbu
7.	Kab Ciamis	24 Desember 2013	Kantor PPCI Kota Ciamis dan KPUD Kota Ciamis
8.	Kota Banjar	26 Desember 2013	Desa Batulawang Kec. Pataruman
9.	Purwakata	27 Des 2013	Majelis Taklim Hoeriyah, Sukatani dan Aula desa Cis-alada
10.	Kota Tasikmalaya	21 dan 26 Desember 2013	SLB Bahagia Tasikmalaya
11.	Kab Indramayu	29 Desember 2013	Balai Desa Brondong Kec. Pasekan
12.	Kab Bandung Barat	28 Desember 2013	Balai Desa Sukasari kec. Gunung Halu
13.	Kota Bogor	30 Desember 2013	Wisma RPSTW Jln. Aria Suriawinata Pulo Empang
14.	Kab Ciamis	24, 25 dan 26 Desember 2013	Aula KPU Kab Ciamis, Sekretariat PPCI kab. Ciamis dan SLB Lumbung, Ciamis
15.	Kab Karawang	31 Desember 2103	Rumah Perlindungan Sosial Tresna Wreda Karawang
16.	Kab Tasikmalaya	31 Desember 2013	Gedung Serba guna Ds. Ciherasas
17.	Kab Subang	24 Desember 2013	Kantor Desa Kali Jati
18.	Kab Sumedang	24 Desember 2013	Sekretariat PPCI, SLB A dan B Cimalaka dan Gedung Dinsos Pemkab
18.	Kab Cianjur	11 Januari 2014	Kantor Kecamatan Sukaluyu Desa Tajung Sari
20.	Kab Majalengka	21 Januari 2014	Aula Desa Jatisurat, Kec.Jatiwangi

21.	Kab Bogor	24,25 Januari 2014	Madrasah Muhamadiyah Barengkok Kec. Leuwiliang
22.	Kota Bandung	30 Januari 2014	Aula Kecamatan Sukajadi
23.	Kota Cirebon	9 Januari 2014	Panti Wreda "KASIH" Jl.Karang Jalak Kel. Sunyaragi
24.	Kab Cirebon	12 Januari 2014	Panti Dinsos FKDC Lemah Abang Cirebon
25.	Kab Garut	26 Januari, 6 dan 9 Februari 2014	Sekretariat HWDI, Graha Nur Ilahi Assani dan Yayasan Bina Mandiri
26.	Kab Bandung	9 Februari 2014	SLB YKS 3 Katapang 1

Melalui pelaksanaan rangkaian kegiatan *community visit* ini, dicapai hasil-hasil secara umum sebagai berikut:

1. Terbangunnya kerjasama yang baik antara organisasi masyarakat sipil yang direpresentasi oleh tim fasilitator, Pemerintah Daerah, KPUD dengan komunitas-komunitas kelompok sasaran.
2. Hal ini ditunjukkan oleh proses perencanaan bersama, pemanfaatan fasilitas Pemda/organsiasi/ sekolah yang digunakan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan tanpa harus menyewa, alat-alat simulasi disediakan oleh KPUD dan bantuan dari organsiasi masyarakat sipil lainnya sebagai pengisi acara;
3. Terjadinya peningkatan penguasaan informasi dan pemahaman pada kelompok sasaran terkait penyelenggaraan Pemilu 2014;
4. Adanya partisipasi atau peranan aktif dari kelompok sasaran secara langsung dalam menyebarluaskan informasi dan proses pendidikan politik lebih lanjut pada anggota keluarga atau tetangganya yang diajak serta dalam kegiatan *communitu visit*;
5. Melalui liputan media terjadi penyebar luasan maksud dan tujuan kegiatan serta informasi-informasi penting terkait penyelenggaraan Pemilu 2014;

4.2 Kunjungan Dari Pintu ke Pintu

Setelah kunjungan dari komunitas ke komunitas, pendekatan berikutnya yang dilakukan adalah pendekatan kunjungan dari pintu ke pintu. Pendekatan ini dilakukan atas dasar pertimbangan: (i) sosialisasi dan pendidikan dengan kunjungan dari rumah ke rumah merupakan cara efektif untuk mencapai target. Pesan kampanye dapat dengan cepat dan dipastikan langsung sampai pada sasaran; dan (ii) cara ini baik untuk menunjukkan kepada target sasaran bahwa kita peduli dan mau bertemu mereka secara langsung yang bersifat pribadi. Dan kita langsung memperoleh tanggapan mengenai pandangan mereka terhadap materi yang kita sampaikan.

Kegiatan kunjungan dari pintu ke pintu yang dilakukan oleh tim relawan/fasilitator di setiap kota/kabupaten diarah oleh sebuah panduan. Panduan ini diperlukan sebagai rujukan anggota tim agar tercapai target yang diharapkan. Di luar itu tentu saja sangat bergantung pada kemampuan komunikasi masing-masing anggota tim fasilitator/relawan. Panduan umum yang diberikan untuk kegiatan ini dapat dilihat pada bagian di bawah ini.

Panduan Kunjungan Pintu ke Pintu

1. Berkunjung dari rumah ke rumah berbicara langsung dengan sasaran satu per satu. Dengan membangun hubungan yang bersifat pribadi.
2. Memperkenalkan diri di awal pembicaraan.
3. Menyampaikan pesan dan mendengar tanggapan balik. Kontak yang dekat ini memungkinkan untuk menarik perhatian dan mengajak calon pemilih yang belum mendapatkan informasi, kejelasan tata cara dan apa yang harus dilakukan.
4. Memberikan brosur kampanye kita dan menjawab beberapa pertanyaan mereka. Mencatat apapun tanggapan balik baik berupa keterangan atau penjelasan maupun pertanyaan-pertanyaan.
5. Fasilitator/relawan tidak selalu menemukan orang yang akan bersikap sopan dan mau mendengarkan. Jika bertemu dengan orang yang kurang ramah, mereka jangan beradu pendapat. Segera hentikan pembicaraan dengan mengucapkan terima kasih dan beranjak ke kunjungan berikutnya.
6. Sekali fasilitator memulai pembicaraan, coba untuk menanyakan ulang apakah nama dan alamat pada Lembar Isian untuk rumah tangga tersebut benar atau tidak.
7. Mengunjungi rumah ke rumah pada siang atau sore hari, dan tidak melakukan kunjungan ke rumah saat waktu makan. Kebanyakan orang tidak suka diganggu saat makan.
8. Sebaiknya tersenyum ketika berbicara dengan pemilih dan bersikap santun, bahkan terhadap mereka yang menentang kita.
9. Mengenakan pakaian yang nyaman, memaki sepatu atau sandal yang nyaman pula
10. Memberikan sesuatu kepada pemilih. Semua orang suka hal yang baru. Fasilitator meninggalkan sesuatu, seperti brosur atau media lainnya.
11. Selalu menyapa responden dengan nama panggilan yang disukai oleh mereka (jika Saudara mengenalnya) untuk pendekatan personal.
12. Memastikan Fasilitator mengkonfirmasi nama, alamat dan nomor telpon mereka.
13. Menjaga agar kunjungan sesingkat mungkin.
14. Jangan berdebat. Bila responden dibantah, mereka biasanya akan langsung mengakhiri pembicaraan.

15. Fasilitator mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk penutup kunjungan.

Panduan Berkomunikasi Dengan Kelompok Penyandang Disabilitas

1. Menumbuhkan rasa percaya diri bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk memilih. Relawan harus memberikan motivasi ke penyandang disabilitas bahwa ada hak yang mungkin mereka selama ini tidak mengetahuinya. Relawan harus menjadi sahabat sehingga penyandang disabilitas lebih enak dalam menerima informasi, tidak menyinggung dengan kecacatannya (dengan menggunakan bahasa yang halus), harus melakukan pendekatan terlebih dahulu (lebih dekat/*friendly*) agar memudahkan apa yang dimaksud dapat tersampaikan. Sehingga timbul dalam diri penyandang disabilitas tersebut kesadaran bahwa dirinya juga memiliki hak.
2. Memberi pengertian dan informasi pada keluarga. Ini sangat penting. Karena mungkin saja ketika relawan datang ke rumah diterima, tetapi ketika pas pemilu keluarganya tidak mendukung penyandang disabilitas tersebut untuk mengikuti pemilu. Relawan juga harus memberi pengertian kepada pihak keluarga, bahwa anggota keluarganya (penyandang disabilitas) juga berhak. Misalnya: menjelaskan bahwa X (si penyandang disabilitas) memiliki hak untuk mengikuti pemilu.
3. Beberapa metode untuk berkomunikasi dengan kelompok difabel: (i) Metode gambar (sarana yang akan mudah digunakan ketika menghadapi calon pemilih tuna wicara); (ii) narasi (untuk tuna netra); (iii) *role play* (bisa digunakan sebagai setengah latihan, yang bisa diberikan untuk kelompok manapun)
4. Beberapa kunci untuk bisa berkomunikasi dengan kelompok difabel:
 - Jika menghadapi individu difabel, cara mengungkapkan diri orang biasa dan difabel tidak sama. Maka relawan harus mengenali dan mengetahui bagaimana cara mengungkapkan, misalnya: cara mengatakan iya (misalkan dengan menggerak-kan tangan, dsb.). Tanyakan kepada mereka bagaimana cara mengungkapkan sesuatu (simbol tidak tahu, kadang-kadang, mungkin, dsb.).
 - Harus sering melakukan inisiatif untuk melakukan komunikasi (misalnya: jika perlu pegang tangannya, pandang matanya agar komunikasi tetap berlangsung jika bukan tuna netra), untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan. Jika kita tidak mengerti maka harus menanyakannya. Jika tidak jelas, kita harus memastikannya.

Panduan Komunikasi Dengan Kelompok Lansia

1. Pendekatan kepada lansia dengan cara membawa buah tangan

2. Menggunakan bahasa yang dipahami (bahasa daerah masing-masing)
3. Tidak berbelit-belit (dalam sosialisasi, bahasa yang dipakai relawan jangan berbelit-belit sehingga lansia tidak menjadi bingung)
4. Berusaha menjadi keluarga bagi mereka.
5. Membawakan acara kesenian (melalui grup musik, dll. Penghuni panti juga bisa dilibatkan untuk membawakan kesenian)



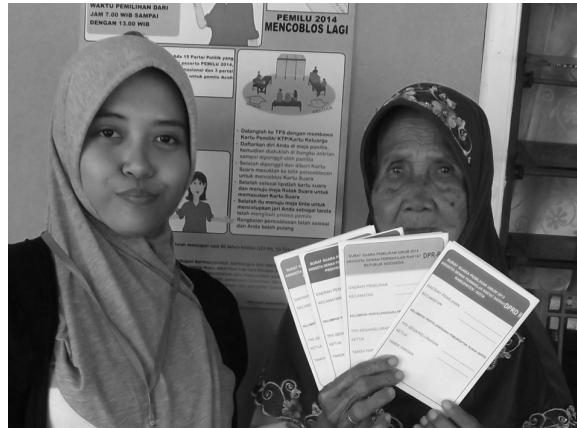
Fasilitator Kota Sukabumi menjelaskan informasi tentang pemilu melalui media pamflet



Warga lansia Teluk Jambe, Kab. Karawang menyerap informasi pemilu melalui media poster



Fasilitator Kab. Bogor menjelaskan tata cara pencoblosan dengan menggunakan contoh surat suara



Contoh surat suara, media yang efektif dalam menjelaskan tata cara pencoblosan

Berdasarkan perencanaan, target kunjungan pintu ke pintu ini dapat menysasar 13.000 orang penyandang disabilitas dan lansia di 26 kota/kabupaten (500 orang per kota/kabupaten). Di luar target langsung tersebut, tentu diharapkan ada target tidak langsung juga seperti anggota keluarga atau tetangga yang akan turut mendampingi atau mengikuti dialog pada saat kunjungan pintu ke pintu tersebut. Jika diasumsikan jumlah target tidak langsung tersebut 3 orang untuk setiap kunjungan, maka jumlah penerima manfaat langsung dan tidak langsung akan mencapai 52.000 orang.

Pada pelaksanaannya, target tersebut tidak tercapai seluruhnya. Pelaksanaan kunjungan dari pintu ke pintu (*door to door*) dilakukan mulai dari bulan Februari-Maret 2014. Setiap fasilitator dibekali 3 alat peraga dan angket untuk melakukan pendidikan dan diseminasi informasi, yaitu: poster, pamflet dan contoh kartu suara. Setiap selesai melakukan kunjungan, setiap relawan diminta untuk menyusun laporan sesuai dengan format dibawah ini.

Format Laporan Kunjungan Pintu ke Pintu

HARI / TANGGAL: : _____

JAM: : _____

PETUGAS: : _____

ID RELAWAN: : _____

KECAMATAN: : _____

KELURAHAN / DESA: : _____

RT RW

NAMA RESPONDEN : _____

ALAMAT : _____

UMUR : _____

KELOMPOK RESPONDEN : LANSIA/DIFABEL

Sebutkan jenis disabilitas : _____

CATATAN

1. Responden

Pengalaman Bapak/Ibu mengikuti Pemilu:
Kendala yang dihadapi dalam mengikuti Pemilu:
Harapan untuk pihak penyelenggaran Pemilu:
Harapan untuk Partai Politik
Harapan untuk Calon Anggota Legislatif

2. Catatan Dari Fasilitator

Bagaimana Proses Pendidikan dan Sosialisasi dilakukan:
Kendala yang dihadapi:
Pengalaman menarik dengan responden:
Catatan khusus/menarik yang disampaikan responden:

4.3 Hasil Angket Kunjungan Komunitas dan Dari Pintu ke Pintu

Responden merupakan target grup program Diseminasi Informasi dan Pendidikan Pemilih, untuk Kelompok Masyarakat Penyandang Disabilitas dan Lansia di 26 Kota/Kabupaten se-Jawa Barat. Pada perencanaan program dan kegiatan, ditargetkan angket yang disebar melalui pendekatan *door to door* dan *community visit* ini akan diisi responden dan kembali sebanyak 16.900 angket. Jumlah tersebut ditargetkan melalui pendekatan *door to door* sebanyak 13.000 (500 per kab/kota) dan melalui pendekatan *community visit* sebanyak 3.900 (150 per kab/kota).

Pada pelaksanaannya, target tersebut tidak tercapai seluruhnya. Pelaksanaan rangkaian *community visit* dilaksanakan sepanjang bulan Desember 2013 sampai dengan Februari 2014. Sementara pelaksanaan *door to door* dilakukan pada periode bulan Februari-Maret 2014.

Jumlah responden yang mengisi angket dan berhasil dikumpulkan sebanyak 14.140 angket yang terisi. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- i. Fasilitator lebih menekankan pada proses sosialisasi dan simulasi pada saat *community visit* sehingga tidak semua pelaksanaan *community visit* berhasil mengelola proses pengisian dan pengumpulan angket;
- ii. Kesulitan fasilitator yang melakukan *door to door* untuk dapat mengunjungi responden penyandang disabilitas, karena keterbatasan informasi mengenai jumlah dan sebaran kelompok sasaran;
- iii. Tidak semua partisipan kegiatan dalam program ini bersedia mengisi angket;
- iv. Meskipun jumlahnya minor, ada angket yang tercecer dalam proses pengumpulan dan pengiriman.

Tabel 9
Jumlah dan Karakteristik Responden per Kabupaten/Kota

NO	KOTA/KABUPATEN	JMLH RESPON- DEN (org)	KARAKTERISTIK RESPONDEN (org)				
			JENIS KELAMIN		USIA		
			L	P	<30	31-55	>55
1	Kab Bandung (D)	150	88	62	100	46	4
2	Kab Bandung Barat	559	279	280	15	30	514
3	Kab Sumedang (D)	461	284	177	114	234	115
4	kab Cianjur	647	285	362	0	2	643
5	Kab Purwakarta	652	278	374	0	5	649
6	Kab Subang (D)	652	360	292	177	317	153
7	Kab Karawang	498	256	242	0	1	497
8	Kab Bekasi	469	244	225	0	38	440
9	Kab Majalengka	449	222	227	0	2	447
10	Kab Kuningan (D)	499	307	192	162	253	85
11	Kab Cirebon	646	320	326	87	196	361
12	Kab Ciamis (D)	712	413	299	182	361	169
13	Kab Bogor	357	59	298	0	1	356
14	kab Sukabumi	561	245	316	11	28	523
15	Kab Garut (D)	428	277	151	134	226	68

16	Kab Tasikmalaya	496	225	271	0	33	465
17	Kab Indramyau	626	278	348	4	2	620
18	Kota Bandung (D)	645	354	291	301	275	116
19	Kota Cimahi	635	242	393	0	0	635
20	Kota Bekasi	642	305	337	0	76	568
21	Kota Sukabumi	611	231	380	0	1	610
22	Kota Bogor	686	330	356	2	45	638
23	Kota Cirebon	633	301	332	0	195	440
24	Kota Banjar (D)	497	196	301	0	18	479
25	Kota Tasikmalaya (D)	149	81	68	67	80	2
26	Kota Depok	647	222	425	8	65	175
Total		14.140	6.722	7.418	1.364	2.530	9.905

Keterangan: (D) Kabupaten/Kota yang target groupnya penyandang disabilitas

Dari tabel tersebut nampak bahwa karakteristik responden didominasi oleh perempuan yang berjumlah 7.418 orang. Sementara responden laki-laki sebanyak 6.722 orang. Dari sisi klasifikasi usia, responden didominasi oleh mereka yang usianya diatas 55 tahun yaitu sebanyak 9.905 orang. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik responden seperti ini mencerminkan kelompok sasaran utama dari program ini yaitu lansia dan penyandang disabilitas.

Khusus untuk kabupaten/kota yang kelompok sasarannya penyandang disabilitas, klasifikasi usia partisipan didominasi oleh yang usianya antara 30-55 tahun dan dibawah 30 tahun. Seperti terlihat di Kabupaten Bandung, Kuningan, Subang, Garut, Sumedang, Ciamis, Kota Bandung dan Tasikmalaya.

Pengalaman Menyalurkan Hak Pilih

Selain karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dan usia, diidentifikasi juga pengalaman responden menggunakan hak pilih pada pemilu/pilkada sebelumnya. Teridentifikasi bahwa 83.3 % responden pernah menyalurkan hak pilihnya pada pemilu dan pilkada sebelumnya. Sementara 16.7 % belum pernah menyalurkan hak pilihnya. Selengkapnya dapat dilihat pada table 2 dibawah ini.

Tabel 10
Pengalaman Responden dalam Menyalurkan Hak Pilih

	Jawaban	Perempuan	Laki-laki
Ya	10942	83.3%	
Tidak	2187	16.7%	
Jumlah	13129	100.0%	

Jawaban	Perempuan	Laki-laki
Ya	81.5%	1.9%
Tidak	16.4%	0.3%

Bagi responden yang belum atau tidak menyalurkan hak pilihnya pada pemilu dan pilkada sebelumnya memiliki alasan yang beragam. Alasan yang paling banyak adalah karena responden kesulitan mengakses TPS (42 %). Disusul oleh rendahnya kepercayaan terhadap Pemilu (29.1%) dan karena tidak mengetahui informasi pemilu (22.6 %). Sementara kalau dilihat dari data terpilah, nampak bahwa responden yang tidak menyalurkan hak pilih sebelumnya adalah laki-laki dengan urutan alasan yang sama.

Selengkapannya mengenai presentase terkait alasan-alasan yang tidak menyalurkan hak pilihnya dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini.

Tabel 11
Alasan Tidak Menyalurkan Hak Pilih pada Pemilu

Tidak Percaya Pemilu	368	29.1 %
Tidak Tahu Informasi Pemilu	285	22.6 %
Kesulitan Mengakses TPS	531	42.0 %
Sakit	79	6.3 %
Lainnya	0	0.0 %
Jumlah	1263	100.0 %

Jawaban berdasarkan Jenis Kelamin	Perempuan	Laki-laki
Tidak Percaya Pemilu	0.1 %	29.1 %
Tidak Tahu Informasi Pemilu	0.2 %	22.3 %
Kesulitan Mengakses TPS	0.1 %	42.0 %

Sakit	0.2 %	6.0 %
Lainnya	2.3 %	4.7 %

Jika dilihat lebih detil lagi pada tingkatan kabupaten/kota, responden yang lebih banyak memiliki pengalaman menyalurkan hak pilihnya pada pemilu sebelumnya, yaitu Kabupaten Bekasi, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bogor. Jika dilihat dari pemilahan berdasarkan jenis kelamin, dominasi yang berpengalaman menyalurkan hak pilihnya adalah perempuan. Sementara itu, responden yang lebih dominan tidak menyalurkan hak pilihnya pada pemilu/kada sebelumnya tersebar di Kota Cirebon (65.7%) dan Kabupaten Bandung (51.7%).

Tabel 12
Pengalaman Responden dalam Menyalurkan Hak Pilih
Per Kabupaten/Kota di Jawa Barat

NO	KOTA/KABUPATEN	PENGALAMAN (%)			
		YA		TIDAK	
		L	P	L	P
1	Kab Bandung	27.5	20.8	30.9	20.8
2	Kab Bandung Barat	41.3	44.8	8.4	5.5
3	Kab Sumedang	48.2	29.4	13.2	9.2
4	kab Cianjur	37.6	44.3	6.3	11.8
5	Kab Purwakarta	39.4	46.8	5.4	8.4
6	Kab Subang	41.5	37.2	12.7	8.6
7	Kab Karawang	41.3	37.7	10.0	11.0
8	Kab Bekasi	51.8	47.1	0.8	0.3
9	Kab Majalengka	41.2	36.0	8.3	14.5
10	Kab Kuningan	45.4	28.6	16.0	10.0
11	Kab Cirebon	40.0	41.9	9.0	9.0
12	Kab Ciamis	44.2	32.5	14.6	8.7
13	Kab Bogor	12.6	79.8	1.1	6.5
14	kab Sukabumi	35.8	46.1	8.5	9.6

15	Kab Garut	53.3	28.0	11.6	7.1
16	Kab Tasikmalaya	33.4	37.8	11.9	16.9
17	Kab Indramyau	37.5	54.5	3.4	4.6
18	Kota Bandung	17.1	66.8	4.4	11.8
19	Kota Cimahi	36.9	60.0	1.2	1.9
20	Kota Bekasi	42.8	45.9	4.9	6.4
21	Kota Sukabumi	32.8	64.6	0.6	2.0
22	Kota Bogor	46.4	48.9	2.2	2.5
23	Kota Cirebon	16.0	18.3	31.3	34.4
24	Kota Banjar	37.8	53.5	1.6	7.0
25	Kota Tasikmalaya	32.9	33.6	21.5	12.1
26	Kota Depok	32.8	63.0	1.4	2.8

Persepsi Responden Dampak Ekonomi Pemilu 2014

Salah satu aspek yang digali melalui angket adalah persepsi responden terhadap dampak ekonomi dari diselenggarakannya Pemilu 2014. Artinya, seberapa yakin atau tidak yakin responden bahwa Pemilu 2014 akan membawa dampak pada perbaikan kehidupan ekonomi mereka.

Berdasarkan data pada tabel 13 dibawah ini, pada umumnya responden percaya bahwa Pemilu 2014 yang akan memberikan dampak perbaikan ekonomi pada kehidupan mereka (43.7 %). Sementara yang ragu-ragu sebanyak 24.5 % dan mereka yang tidak percaya sebanyak 10.3 %. Selebihnya tidak tahu dan tidak berpendapat. Sementara itu, dilihat dari pemilahan jenis kelamin, responden laki-laki yang dominan memiliki kepercayaan atas dampak ekonomi dari penyelenggaraan Pemilu 2014 tersebut (42.8 %).

Tabel 13
Persepsi terhadap Dampak Ekonomi Pemilu 2014

Percaya	5238	43.7%
Ragu-ragu	2933	24.5%
Tidak Percaya	1233	10.3%
Tidak Tahu	1942	16.2%

Tidak Berpendapat	638	5.3%
Jumlah	11984	100.0%

	Perempuan	Laki-laki
Percaya	0.9%	42.8%
Ragu-ragu	1.1%	23.4%
Tidak Percaya	0.1%	10.2%
Tidak Tahu	0.2%	16.0%
Tidak Berpendapat	0.0%	5.3%

Pemilu 2014 dan Kepentingan Kelompok Sasaran

Aspek berikut terkait persepsi responden yang diidentifikasi adalah menyangkut keterkaitan, antara penyelenggaraan pemilu 2014 dengan kepentingan kelompok sasaran yaitu penyandang disabilitas dan lansia. Dengan kata lain, yang ingin digali adalah sejauh mana tingkat kepercayaan responden bahwa pemilu 2014 akan memberikan manfaat terhadap kepentingan khusus kaum lansia dan penyandang disabilitas.

Berdasarkan hasil analisis terhadap angket, teridentifikasi bahwa mayoritas responden memiliki keyakinan bahwa pemilu 2014 akan memberikan kontribusi pada pemenuhan kepentingan mereka (39.2 %). Mereka yang masih meragukan sebesar 23 % dan yang tidak yakin sebesar 14.1 %. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, mereka yang memiliki keyakinan ini didominasi oleh laki-laki (38.2 %).

Tabel 14
Persepsi Dampak Pemilu terhadap Kepentingan Kelompok Sasaran

			Perempuan	Laki-laki
Yakin	4666	39.2%	1.0%	38.2%
Ragu-ragu	2736	23.0%	1.0%	22.0%
Tidak Yakin	1682	14.1%	0.2%	13.9%
Tidak Tahu	2126	17.9%	0.2%	17.6%
Tidak Berpendapat	694	5.8%	0.0%	5.8%
Jumlah	11904	100.0%		

Kepercayaan terhadap Wakil Rakyat dan Presiden Terpilih

Aspek ini terkait dengan tingkat kepercayaan responden, apakah wakil rakyat dan presiden yang dipilih dapat mewakili dan memperjuangkan kepentingan mereka. Seperti pada aspek-aspek sebelumnya, mayoritas responden memiliki keyakinan bahwa wakil rakyat dan presiden yang akan dihasilkan melalui pemilu 2014 ini, akan memperjuangkan kepentingan mereka (40.5 %). Dan hal ini didominasi oleh responden laki-laki (39.5 %).

Tabel 15
Persepsi terhadap Keterwakilan Kepentingan

			Perempuan	Laki-laki
Yakin	4745	40.5%	1.0%	39.5%
Ragu-ragu	2479	21.2%	1.0%	20.1%
Tidak Yakin	1499	12.8%	0.2%	12.6%
Tidak Tahu	2131	18.2%	0.2%	18.0%
Tidak Berpendapat	850	7.3%	0.0%	7.2%
Jumlah	11704	100.0%		

Jika dilihat lebih jauh berdasarkan kabupaten/kota, responden yang memiliki tingkat keyakinan terhadap aspek-aspek tersebut tersebar di Kota Cimahi, Kabupaten Bekasi dan Kota Depok. Sementara yang paling rendah tingkat keyakinannya paling dominan responden di Kabupaten Subang, Bandung dan Sumedang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 8 dibawah ini.

Tabel 16
Persepsi Responden berdasarkan Kabupaten/Kota

NO	KOTA/KABUPATEN	DAMPAK EKONOMI (%)					DAMPAK PD KELOMPOK (%)					KETERWAKILAN (%)				
		P	R	TY	TT	TB	Y	R	TY	TT	TB	Y	R	TY	TT	TB
1	Kab Bandung	12.8	32.4	7.4	38.5	8.8	13.4	26.8	18.8	35.6	5.4	10.1	25.5	26.8	32.2	5.4
2	Kab Bandung Barat	35.9	40.3	4.9	17.9	1.1	37	36.1	7.3	18.4	1.1	37.2	37.4	7	17.2	1.3
3	Kab Sumedang	18.5	48.9	9.3	19.8	3.5	15.4	34.7	25.1	20.4	4.4	32.7	16.3	28.8	17.6	4.6
4	kab Cianjur	23.3	22.9	5.4	35.5	12.9	15.5	18.3	7.2	41.6	15.4	19.1	24.3	4.8	38.3	13.5

Bab 4 - Kunjungan Komunitas dan Dari Pintu ke Pintu

5	Kab Purwakarta	60.2	0	18.3	15.5	6	49	0	31.8	14.1	5.1	49.4	0	25.9	19.1	5.6
6	Kab Subang	9	51.2	25.2	13.3	1.3	12	67.6	0	17.7	2.7	10	62.5	0	24.9	2.7
7	Kab Karawang	44.3	0	9.1	28	18.6	35.2	0	15.3	26.8	22.7	34.3	0	17.4	25.6	22.7
8	Kab Bekasi	78.7	9.3	2.7	8.8	0.5	80.6	14.4	3.7	0.8	0.5	71.3	23.4	1.6	2.4	1.3
9	Kab Majalengka	15.8	43.7	3.3	28.1	9.1	3.4	32.2	27.3	28.4	8.8	13.7	39.5	15.7	23.1	8.1
10	Kab Kuningan	52.1	0	11.3	26.2	10.5	45.8	0	14.6	28.6	10.9	48.8	0	12.9	25.4	12.9
11	Kab Cirebon	44.1	29.6	7	15.6	3.7	25.5	34.5	10.4	26.7	2.8	39.8	18.3	8.1	31	2.8
12	Kab Ciamis	61.9	4.5	2.5	29.4	1.8	58.2	6.5	3	29.7	2.5	60.6	4.6	2.1	29.1	3.4
13	Kab Bogor	50	30.4	11.1	7.2	1.2	41.3	32.9	15.9	8.7	1.2	55.8	22.1	11.7	8.3	2.1
14	kab Sukabumi	44.4	17.9	8.8	23.2	5.7	33.5	19.5	11.2	28.2	7.6	37.5	22	10.8	22	7.6
15	Kab Garut	21.6	49.5	9.2	17.8	1.9	21.6	53.9	15	8.8	0.7	34.2	41.8	13.8	7.6	2.6
16	Kab Tasikmalaya	68.6	13.9	3.2	7.8	6.4	66.3	9.9	4.5	13	6.3	50.9	15.2	4.6	20.8	8.5
17	Kab Indramyau	48.5	12.8	22.2	11.4	5.1	33.3	13.8	18.9	26.4	7.7	34.4	11.3	27.2	14	13
18	Kota Bandung	33.9	31.9	7.5	20.9	6.7	34.9	28.8	14	15.4	6.9	37	26.2	13.2	15.4	8.1
19	Kota Cimahi	85	0	9.3	5.3	0.4	74.3	4	17.1	4.4	0.2	87.5	5.2	2.9	3.5	0.9
20	Kota Bekasi	43.6	0	30.9	20.1	5.4	38.5	0	33.2	23.7	4.5	32.6	0	37.7	25.3	4.3
21	Kota Sukabumi	38	48.4	7.1	4.7	1.8	41.9	41.3	8.1	5.3	3.5	39.2	46.3	7.3	4.5	2.7
22	Kota Bogor	34.9	34.4	14	11.3	5.5	32.6	34.3	13.3	13.9	5.9	26.5	36.7	13	17.9	6
23	Kota Cirebon	24.8	31.5	20	12.3	11.5	21.2	35.5	19.7	13.4	10.2	15.5	15.6	17.5	23.9	27.4
24	Kota Banjar	57.3	25.4	5.2	9.7	2.4	53.6	19.2	15.5	9.5	2.2	60.4	18.3	9.3	10.8	1.2
25	Kota Tasikmalaya	65.4	0	20.2	10.6	3.8	49.5	0	31.9	16.5	2.2	31	0	42	23	4
26	Kota Depok	74	7.7	5.7	10.9	1.7	74.7	3.6	11.2	7.8	2.7	69.8	6.6	8.9	12.3	2.3

Penguasaan Informasi Responden

Aspek berikutnya yang diidentifikasi melalui angket ini adalah, aspek penguasaan informasi responden terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2014. Hal ini penting terkait dengan tujuan utama dari program secara keseluruhan yaitu untuk diseminasi informasi dan pendidikan pemilih.

Penguasaan informasi ini menjadi modal awal bagi upaya pemenuhan hak-hak politik kelompok sasaran pada Pemilu 2014. Penguasaan informasi dalam hal ini terkait dengan sejauh mana responden telah mengetahui apakah mereka telah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), waktu penyelenggaraan Pemilihan Legislatif (pileg) dan Pemilihan Presdient-Wakil Presiden (pilpres), lokasi TPS dimana mereka dapat menyalurkan hak pilihnya, serta hal-hal teknis terkait jumlah surat suara dan teknik mencoblos

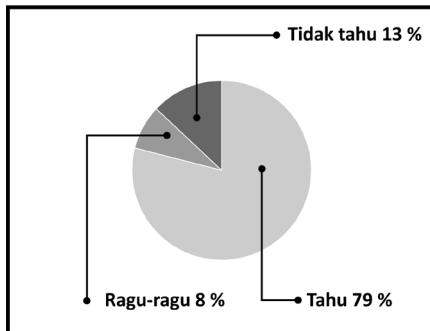
sehingga dapat dipastikan suara mereka sah.

Berdasarkan identifikasi melalui penyebaran angket ini, terlihat bahwa penguasaan informasi responden cukup baik pada 3 aspek, yaitu: penguasaan informasi mengenai cara mencoblos 78.8 %, DPT sebanyak 74.7 % dan waktu pelaksanaan pileg sebanyak 73 %. Sementara itu, pada aspek-aspek seperti jumlah surat suara, peserta pemilu dan lokasi TPS, jumlah responden yang telah mengetahui dan belum hampir berimbang jumlahnya. Responden yang telah mengetahui lokasi TPS sebanyak 55.7 %, jumlah surat suara sebanyak 51.5 % dan jumlah peserta pemilu 2014 sebanyak 53.7 %. Satu aspek dimana responden lebih dominan tidak mengetahui informasinya adalah terkait penyelenggaraan pilpres 2014 yaitu sebanyak 43.5%.

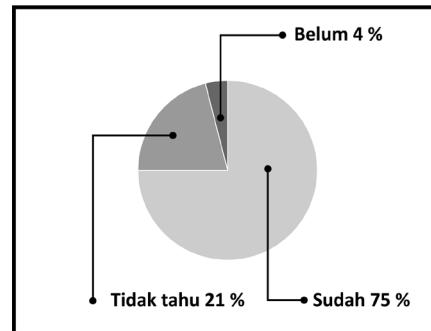
Dan selebihnya tidak mengetahui kapan pilpres 2014 diselenggarakan. Hal ini besar kemungkinan disebabkan oleh jarak pengisian angket dengan pelaksanaan pilpres itu sendiri yang masih lama dibandingkan dengan pelaksanaan pileg. Selengkapnya mengenai gambaran mengenai penguasaan informasi responden terkait aspek-aspek tersebut dapat dilihat pada diagram-diagram dibawah ini.

Diagram 1
Penguasaan Informasi Responden

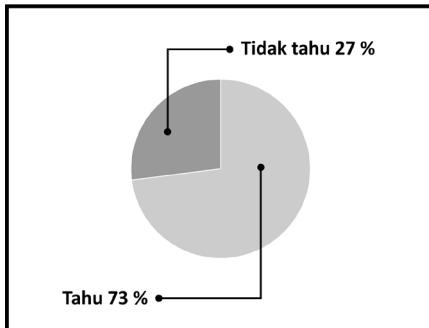
**Pengetahuan Responden tentang Pemilu 2014
Dilakukan dengan Mencoblos**



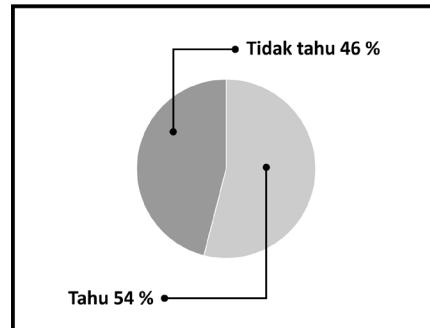
Responden yang Terdaftar dalam DPT



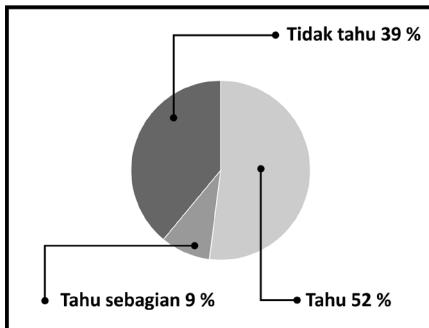
Pengetahuan Responden tentang Waktu Pelaksanaan Pemilihan Legislatif



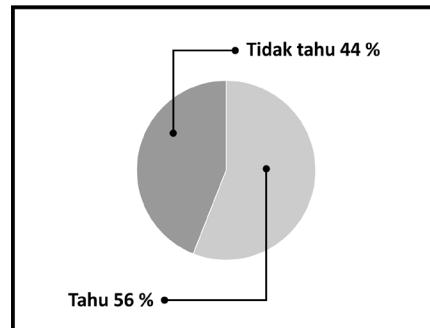
Pengetahuan Responden tentang Jumlah Partai Peserta Pemilu 2014



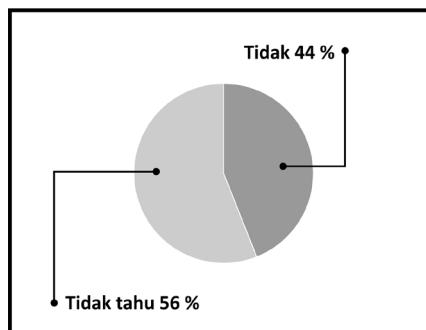
Pengetahuan Responden tentang Jumlah Surat Suara yang Dicoblos dalam Pemilu Legislatif



Responden yang Tahu Lokasi Tempat Pemungutan Suara



Pengetahuan Responden tentang Waktu Pelaksanaan Pemilihan Presiden



Bab 5

Antusiasme pada Pemilu 2014

Guna menangkap sejauh mana antusiasme kelompok target pada pelaksanaan Pemilu 2014, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden-wakil presiden, dilakukan kegiatan monitoring.

Kegiatan monitoring ini merupakan bagian dari rangkaian Program Sosialisasi dan Diseminasi Informasi untuk Pemilih Lansia dan Penyandang Disabilitas di Propinsi Jawa Barat. Program yang diinisiasi oleh B_Trust dan didukung oleh Uni Eropa. Rangkaian kegiatan dalam lingkup program ini sendiri telah dimulai sejak bulan Januari 2013. Mulai dari pembentukan dan pelatihan tim fasilitator, sosialisasi program pada berbagai pihak terkait, pembangunan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan penyelenggara pemilu, sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui kegiatan *community visit* dan *door to door*, serta pendampingan pada kelompok sasaran.

Kegiatan monitoring bertujuan untuk memantau dinamika dan dampak dari kerja-kerja sosialisasi, pendidikan dan pendampingan yang telah dilakukan sebelumnya pada kelompok sasaran. Dengan kata lain, kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan umpan balik atas efektivitas berbagai pendekatan yang telah dilakukan terhadap peningkatan penguasaan informasi dan peningkatan partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pemilihan Legislatif tanggal 9 April 2014.

Guna mendekati tercapainya apa yang menjadi maksud dan tujuan, monitoring seperti yang telah disampaikan diatas, dipilih dua pendekatan, yaitu: (i) pendampingan dan pengamatan langsung para fasilitator pada hari H pelaksanaan pileg 9 April 2014 di beberapa TPS sampel yang dipilih secara acak; dan (ii) melakukan penyebaran angket pada kelompok sasaran melalui pendekatan sampel secara acak sebanyak 500 responden pada paska Pemilihan Legislatif. Pendekatan yang pertama dilakukan tidak semata-mata untuk memantau. Tapi juga dilakukan para fasilitator untuk memberikan dampingan pada kelompok sasaran pada hari H agar benar-benar terjamin hak-hak politiknya.

Pemantauan pada Hari H

Proses pemantauan dilakukan oleh para koordinator fasilitator dan tim inti pengelola program B_Trust. Beberapa tempat yang dipantau secara langsung diantaranya adalah Kabupaten Kuningan, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Subang.

Sebagai gambaran, salah satu contoh kegiatan monitoring yang dilakukan di Kabupaten Kuningan. Monitoring dilakukan di beberapa TPS dan Rumah Sakit, khususnya yang berada di Kecamatan Kuningan dan Kecamatan Cigugur. Pilihan ini didasarkan pada pertimbangan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pemilu yang telah dilakukan dengan cara *community visit* dan *door to door* yang memang dilakukan di daerah bersangkutan. Di Kecamatan Kuningan tercatat ada 301 jiwa penyandang disabilitas. Sedangkan di Kecamatan Cigugur tercatat 397 jiwa. Pengamatan dilakukan khususnya di 39 TPS dan 2 Rumah Sakit.

Pengaruh yang dirasakan oleh difabel sangat besar selain menambah pengetahuan tentang pemilu tapi juga membangkitkan rasa percaya diri untuk ikut menyuarakan hak pilihnya. Ini dibuktikan dengan banyaknya difabel tuna daksa, tuna rungu, tuna wicara, mental ringan, dan tuna netra yang hadir bersama pendampingnya ke TPS.

Berbeda dengan difabel yang lain, tuna netra dan mental ringan maupun berat harus mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus. Seperti tuna netra yang wajib ditawarkan apakah ingin mencoblos sendiri dengan menggunakan template surat suara atau ditemani oleh pendamping yang mereka percayai tentunya dengan mengisi surat pernyataan. KPU Kabupaten Kuningan telah menyediakan 'template' per TPS 1 lembar untuk surat suara DPD. Namun setelah ditinjau di lapangan difabel tuna netra lebih banyak yang menggunakan surat pernyataan menggunakan pendamping (keluarga).

Untuk difabel mental ringan masih ada beberapa yang langsung hadir ke TPS sendiri. Namun bagi difabel mental berat tidak ada yang mendatangi TPS, dan ini memang perlu dimaklumi. Ada beberapa difabel yang perlu dijemput ke rumah oleh pihak panitia TPS setempat, namun pada saat dikonfirmasi waktu

akan menjemput DPT panitia sendiri tidak dapat memastikan karena di TPS memang repot. Antara pembagian waktu dan personel mereka mengaku kewalahan. Jadi Kordinator sendiri tidak bisa menunggu sampai kapan pihak panitia akan mendatangi DPT difabel yang berhalangan hadir.

Di Kelurahan Purwawinangun panitia TPS memberikan berita bahwa ada difabel yang berhalangan hadir karena sedang melahirkan dan ditemani suaminya di Rumah Sakit Umum 45 Kuningan. Dijumpai di ruang Nifas, mereka sedang menunggu izin pulang dari Dokter. Sambil menunggu, pihak KPU, PANWASLU, KPPS, dan saksi menjumpai mereka di ruang dan fasilitas yang terbatas mereka tetap memberikan suara dengan cara menyerahkan KTP karena kartu DPT mereka tertinggal di rumah.



Template braille untuk memudahkan penyandang tuna netra melakukan pencoblosan



Seorang penyandang disabilitas melakukan pencoblosan di Rumah Sakit atas bantuan fasilitator dan petugas TPS

Di Purwakarta, pemantauan pada hari pencoblosan di beberapa TPS yang menjadi tempat memilih bagi Lansia yang menjadi obyek pada program *community visit* dan *door to door* terlihat masih terdapat antrian pemilih menjelang batas waktu pencoblosan dan pada saat penghitungan nampak diantaranya para lansia turut menyaksikan.

Pemantauan pada wilayah yang menjadi lokasi *community visit* dilakukan pada TPS-TPS yang tersebar di 2 Desa, yaitu: Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani dan Desa Cisalada, Kecamatan Jatiluhur. Berdasarkan laporan tim fasilitator yang melakukan pendataan, diketahui bahwa tingkat partisipasi kelompok sasaran di Desa Sukatani mencapai 81 % dan di Desa Cisalada mencapai 79 %. Tingkat partisipasi ini jika dibandingkan dengan pileg 2009 dan Pemilihan Gubernur 2013 di tempat yang sama mengalami peningkatan. Dimana

sebelumnya tingkat partisipasi berkisar pada angka 72%.

Sementara itu, pemantauan pada lokasi yang menjadi target kegiatan *door to door* dilakukan di Kelurahan Nagri Kaler, Cipaisan, Sindang Kasih, Tegal Munjul, Ciseureuh dan Nagri Kidul. Secara berurutan, tingkat partisipasi kelompok sasaran di beberapa TPS di kelurahan-kelurahan tersebut adalah 78 %, 80 %, 82 %, 89 %, 74 % dan 75 %. Tingkat partisipasi ini meningkat dibandingkan pileg 2009 dan Pemilihan Gubernur 2013 yang berkisar di angka 70-72%.

Peningkatan partisipasi kelompok sasaran dalam menyalurkan hak politiknya dalam Pemilihan Legislatif 2014 juga terjadi di Kota Depok. Berdasarkan hasil pemantauan pada saat hari H dan memperoleh data dari PPS, jumlah Pemilih Lansia yang hadir pada saat pemilihan di lokasi-lokasi dilakukannya kegiatan *community visit* dan *door to door* yaitu di Kelurahan Sawangan Lama dan Sawangan Baru mengalami peningkatan. Jika pada Pileg 2009 dan Pilgub 2013 rata-rata kehadiran pemilih lansia di 21 TPS dua kelurahan tersebut kurang dari 50 %, pada Pileg 2014 ini meningkat rata-rata kehadirannya menjadi 77,3 %. Selengkapnya mengenai tingkat partisipasi tiap TPS di 2 keluarahan yang menjadi fokus monitoring dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 17
Tingkat Partisipasi Kel. Sawangan Lama dan Sawangan Baru

NO	TPS	Jumlah Pemilih Lansia	Jumlah yang Hadir	%
Sawangan Lama				
1	017	30 orang	21 orang	70 %
2	018	25 orang	18 orang	72 %
3	019	23 orang	15 orang	63 %
4	020	20 orang	12 orang	60 %
5	021	25 orang	19 orang	76%
6	022	20 orang	15 orang	75 %
7	023	27 orang	18 orang	67 %
8	024	32 orang	25 orang	78 %
9	025	35 orang	27 orang	77 %
10	030	37 orang	25 orang	68 %
11	031	25 orang	21 orang	84 %

Sawangan Baru

1	010	33 orang	25 orang	76 %
2	011	34 orang	29 orang	85 %
3	013	20 orang	17 orang	85 %
4	014	15 orang	12 orang	80 %
5	015	17 orang	13orang	77 %
6	017	15 orang	14 orang	93 %
7	018	20 orang	18 orang	90 %
8	020	15 orang	13 orang	87 %
9	021	20 orang	17 orang	85 %
10	022	21 orang	16 orang	76%

Situasi serupa juga terjadi di Kabupaten Bogor. Dari beberapa tempat yang berhasil dimonitoring, diperoleh gambaran mengenai tingkat partisipasi pemilih kelompok sasaran yang cukup tinggi, yaitu diatas 80%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 18
Tingkat Partisipasi Pemilih Lansia
Di Beberapa TPS Kabupaten Bogor

Desa	TPS	Partisipasi Pemilih Lansia
Desa Barengkok	01	90 % dari 70 Lansia penerima manfaat kegiatan
	02	80 % dari 30 Lansia penerima manfaat kegiatan
	03	90 % dari 21 Lansia penerima manfaat kegiatan
	06	100 % dari 5 Lansia penerima manfaat kegiatan
	08	90 % dari 57 Lansia penerima manfaat kegiatan
Desa Leuwiliang	02 dan 04	90 % dari 110 Lansia penerima manfaat kegiatan
Ds. Leuwi Mekar	04 - 08	80 % dari 220 Lansia penerima manfaat kegiatan
Ds. Leuwi Sadeng	04 dan 06	90 % dari 120 Lansia penerima manfaat kegiatan
Ds. Babakan Sadeng	04, 05 ,06, 10	90 % dari 360 Lansia penerima manfaat kegiatan



Dengan dibantu tim fasilitator Kota Sukabumi dan didampingi petugas TPS, Mak Enoy seorang lansia yang karena keterbatasan fisiknya tidak dapat hadir ke TPS melakukan pencoblosan di rumahnya



Hasil Angket

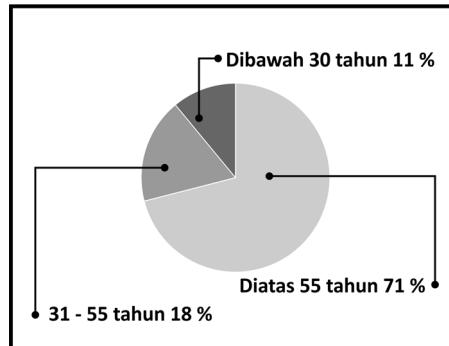
Pendekatan lainnya yang digunakan untuk mengukur sejauh mana dampak dari intervensi kegiatan-kegiatan sebelumnya pada tingkat partisipasi pemilih pada kelompok sasaran, dengan menyebarkan angket. Jumlah angket yang disebar menasar 500 responden, merupakan partisipan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Penyebaran angket tersebut dilakukan di Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung Barat.

Angket yang kembali dan berhasil diolah datanya sejumlah 474 responden. Terdiri dari 230 responden laki-laki dan 244 responden perempuan. Sementara itu, jika dilihat dari kareakteristik responden berdasarkan usia, mayoritas responden adalah mereka yang usianya diatas 55 tahun, yaitu sebanyak 71%. Selengkapanya dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini.

Tabel 19
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	230
Perempuan	244

Diagram 2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia



Berdasarkan hasil pengolahan data angket diketahui bahwa mayoritas dari kelompok sasaran yang menjadi responden menyatakan bahwa mereka datang ke TPS dan telah menyalurkan hak politiknya, yaitu sebanyak 98%. Sementara mereka yang tidak datang ke TPS dikarenakan sedang dalam kondisi sakit, tidak ada yang mengantar ke TPS dan tidak mendapatkan surat undangan memilih. Jika dilihat lebih jauh berdasarkan jenis kelamin, mereka yang datang ke TPS dan menyalurkan hak pilihnya terdiri dari 46,5% perempuan dan 45,5% laki-laki.

Epilog

Seluruh rangkaian Pemilihan Umum 2014 baru saja diselesaikan dengan paripurna. Sejumlah anggota DPR/DPRD hasil Pemilihan Legislatif pada bulan April 2014 telah selesai dilantik. Bahkan pada umumnya telah menuntaskan agenda pembentukan pimpinan dan perangkatnya.

Presiden dan Wakil Presiden juga telah terpilih melalui Pemilu pada Juli 2014 dengan serangkaian tahapannya. Tentu saja proses Pemilu 2014 dilalui dengan tahapan-tahapan yang cukup panjang serta melibatkan seluruh perhatian dan menguras energi seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT), Daftar Pemilih Tetap (DPT), sosialisasi, masa kampanye, pencoblosan sampai dengan rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, partisipasi pemilih pada Pemilu Legislatif 2014 mencapai 75,11 %. Dengan angka partisipasi itu, 24,89 % pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Dari rekapitulasi di KPU, suara sah dalam Pemilu Legislatif 2014 adalah 124.972.491 suara.

Sementara itu di Propinsi Jawa Barat sendiri tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2014 sebesar 71,3 %. Dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 33.334.717 orang, yang ke TPS dan menggunakan hak

pilihnya sebanyak 23.776.359 orang. Dengan kata lain, ada 9.568.358 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya. Tingkat partisipasi ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Pemilihan Gubernur pada tahun 2013 yang hanya mencapai 64 %.

Pada Pilpres 2014 partisipasi pemilih adalah sekitar 70 %. Pasangan nomor urut 1 memperoleh 62.576.444 suara atau 46,85 %, sedangkan pasangan nomor urut 2 memperoleh 70.997.833 suara atau 53,15 % dari total suara sah 133.574.277. Adapun total pemilih yang tercatat dalam DPT pilpres sebanyak 190.307.134 orang. Jumlah ini meningkat 2.454.142 orang dari DPT pileg. Penurunan tingkat partisipasi di pilpres terjadi secara persentase, meski terjadi peningkatan dari sisi jumlah suara.

Seiring dengan tahapan tersebut, B_Trust atas dukungan Uni Eropa telah melakukan serangkaian kegiatan yang tujuan utamanya untuk meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya pada kelompok pemilih penyandang disabilitas dan lansia di Propinsi Jawa Barat sejak awal tahun 2013.

Berbagai kegiatan telah dilaksanakan. Mulai dari melakukan pengorganisasian tim fasilitator dan relawan di lapangan, pelatihan-pelatihan, pengembangan kerjasama dengan KPUD dan Panwaslu, sosialisasi dan kampanye publik sampai dengan monitoring pelaksanaan pencoblosan pada tanggal 9 April dan 9 Juli 2014.

Melalui serangkaian kegiatan tersebut, telah terlibat secara langsung sekurang-kurang 14.140 orang dari kelompok masyarakat penyandang disabilitas dan lansia yang tersebar di 26 kota/kabupaten di Propinsi Jawa Barat. Keterlibatan mereka secara langsung terutama melalui rangkaian kegiatan *community visit* dan *door to door*. Karakteristik partisipan program tersebut didominasi oleh perempuan yang berjumlah 7.418 orang. Sementara responden laki-laki sebanyak 6.722 orang. Dari sisi klasifikasi usia, responden didominasi oleh mereka yang usianya diatas 55 tahun yaitu sebanyak 9.905 orang. Sementara untuk usia diantara 30-55 tahun sebanyak 2.530 orang dan usia dibawah 30 tahun sebanyak 1.364 orang.

Melalui instrumen angket yang digunakan untuk mengetahui lebih jauh karakteristik dari partisipan program ini, teridentifikasi bahwa pada umumnya mereka percaya bahwa Pemilu 2014 akan memberikan dampak perbaikan ekonomi pada kehidupan mereka (43.7 %). Sementara yang ragu-ragu sebanyak 24.5 % dan mereka yang tidak percaya sebanyak 10.3 %. Selebihnya tidak tahu dan tidak berpendapat.

Selain itu, teridentifikasi juga sejauh mana tingkat kepercayaan mereka terhadap anggota legislatif serta pasangan presiden dan wakil presiden yang akan dihasilkan melalui Pemilu 2014 ini. Mereka yang memiliki keyakinan bahwa wakil rakyat dan presiden yang akan dihasilkan melalui Pemilu 2014 ini akan memperjuangkan kepentingan mereka sebanyak 40.5 %. Sisanya tidak memiliki keyakinan tersebut.

Penguasaan informasi mereka cukup baik dalam 3 aspek, yaitu: penguasaan informasi mengenai cara mencoblos 78.8 %, DPT sebanyak 74.7 % dan waktu pelaksanaan pileg sebanyak 73 %. Pada aspek-aspek teknis lainnya seperti jumlah surat suara, peserta pemilu dan lokasi TPS, jumlah responden yang telah mengetahui dan belum hampir berimbang jumlahnya. Responden yang telah mengetahui lokasi TPS sebanyak 55.7 %, jumlah surat suara sebanyak 51.5 % dan jumlah peserta Pemilu 2014 sebanyak 53.7 %.

Beberapa pelajaran penting dari pengalaman menjalankan program ini sebagai bahan pemikiran dan pengembangan lebih lanjut pada masa yang akan datang antara lain:

- Program semacam ini mendapatkan respon yang cukup positif bahkan antusias dari penyandang disabilitas dan lansia. Mereka merasa mendapatkan pengakuan, penghormatan dan penghargaan. Karena mereka menilai bahwa dampak yang dirasakan oleh difabel sangat besar. Selain menambah pengetahuan tentang pemilu tapi juga membangkitkan rasa percaya diri untuk ikut menyuarakan hak pilihnya.

Ini dibuktikan dengan banyaknya difabel tuna daksa, tuna rungu, tuna wicara, mental ringan, dan tuna netra yang hadir bersama pendampingnya ke TPS. Begitupun halnya dengan kelompok lansia. Berdasarkan hasil monitoring dan penyebaran angket untuk mengidentifikasi sejauh mana dampak program terhadap tingkat partisipasi mereka diketahui bahwa mayoritas dari mereka yang terlibat langsung dalam berbagai kegiatan menyatakan bahwa mereka datang ke TPS dan telah menyalurkan hak politiknya, yaitu sebanyak 98 %.

Sementara mereka yang tidak datang ke TPS dikarenakan sedang dalam kondisi sakit, tidak ada yang mengantar ke TPS dan tidak mendapatkan surat undangan memilih. Jika dilihat lebih jauh berdasarkan jenis kelamin, mereka yang datang ke TPS dan menyalurkan hak pilihnya terdiri dari 46,5 % perempuan dan 45,5 % laki-laki;

- Disamping itu, program ini juga mendapatkan respon yang cukup baik dari berbagai pihak. Hal ini tercermin dari keterlibatan dan dukungan dari pihak KPU, mulai dari tingkat pusat, provinsi sampai dengan tingkat kota/kabupaten. Bukan saja mengeluarkan surat rekomendasi terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan, tapi juga keterlibatan langsung para komisioner dan pengerahan sumber daya dan perlengkapan yang mereka miliki untuk mendukung kelancaran kegiatan pendidikan pemilih yang dilakukan.

Respon dan dukungan positif juga datang dari kalangan media. Tercatat sekurang-kurangnya 120 wartawan terlibat langsung dalam mendokumentasikan dan memberitakan kegiatan-kegiatan yang

diselenggarakan di 26 kota/Kabupaten. Setidak-tidaknya telah terjadi 50 kali publikasi kegiatan melalui berbagai saluran media, seperti televisi, radio, koran dan media online.

- Pentingnya untuk dilakukan penyempurnaan sistem pendataan kelompok masyarakat penyandang disabilitas dan lansia. Karena sampai saat ini belum ada data yang cukup akurat untuk menggambarkan jumlah dan karakteristik lebih lanjut. Khususnya untuk kelompok masyarakat penyandang disabilitas. Penyempurnaan sistem pendataan ini harus dimulai dari kesadaran masyarakat sendiri untuk secara terbuka dalam menyampaikan informasi. Begitu juga pada pihak pendata harus lebih telaten untuk melakukan pengalihan informasi dan pendataan.
- Harus ada komitmen yang semakin kuat dari kalangan pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif, di pusat dan daerah untuk mengupayakan penyediaan anggaran yang lebih memadai bagi pemenuhan sarana prasarana yang menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan lansia dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Karena berdasarkan pengalaman yang diperoleh di tingkat lapangan, salah satu alasan dari pihak penyelenggara pemilu di tingkat daerah tidak dapat memenuhi penyediaan sarana prasarana karena memang ada keterbatasan alokasi anggaran. Hal ini tentunya merepresentasikan masih lemahnya kesadaran dan perhatian dari penyusun anggaran terhadap upaya penghormatan, pengakuan dan pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas dan lansia.
- Penting adanya kampanye dan pendidikan yang lebih meluas dan berkelanjutan bagi para penyelenggara Pemilu dan jajaran pemerintahan daerah. Pendidikan terutama diarahkan pada pembangunan kesadaran dan kepedulian pada upaya penghormatan, pengakuan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan lansia. Dampaknya harus dapat dirasakan pada perbaikan kebijakan di tingkat daerah untuk memenuhi hak-hak mereka. Baik yang terkait hak-hak sipil politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya. Sehingga isu kesetaraan tidak hanya menjadi isu 'insidental' pada setiap pemilu, tapi mesti hidup dan terus berkembang pada penyelenggaraan urusan publik dalam keseharian.

Lampiran

Daftar Pemberitaan Media

1. Workshop Sosialisasi

1.1 Media Online

- 1.1.1 http://bandungnewsphoto.com/headline/view/193797476/b_trust-dan-uni-eropa-adakan-sosialisasi-bagi-pemilih-penyandang-disabilitas-dan-lansia-marjinal
- 1.1.2 <http://kabar.cimahicybercity.com/2013/02/potensi-golput-kaum-marginal-jabar.html>
- 1.1.3 <http://lipsus.kompas.com/jabarsatu/read/2013/02/19/21184281/akses.penyandang.cacat.terbatas>
- 1.1.4 <http://www.kuningannews.com/index.php/kuningan/tentang/politik-dan-pemerintahan/12432-kpu-siap-layani-pemilih-berkebutuhan-khusus.html>
- 1.1.5 <http://m.pikiran-rakyat.com/node/223824>
- 1.1.6 <http://m.tribunjabar.co.id/2013/02/19/digelar-waorshop-pemilih-penyandang-disabilitas-dan-lansia>

1.2 Media Cetak

- 1.2.1 Kompas, Rabu 20 Februari 2013, Hal 25, “Hak Politik Kaum Difabel”
- 1.2.2 Seputar Indonesia, Rabu 20 Februari 2013, Hal 15, “Sosialisasi Pilgub”
- 1.2.3 Tribun Jabar, Rabu 20 Februari 2013, Hal 5, “Kaum Disabilitas Butuh Fasilitas”

- 1.2.4 Pikiran Rakyat, Rabu 20 Februari 2013, Hal 7, “Kaum Diasabilitas Kurang Perhatian”
- 1.2.5 Galamedia, Rabu 20 Februari 2013, Hal 4, “Kaum Marjinal Berpotensi Golput”

1.3 Media Televisi

- 1.3.1 STV Bandung

2. FGD Dan Pelatihan Fasilitator

2.1 Media Online

- 2.1.1 Kota Dan Kab. Cirebon
<http://cirebontoday.com/index.php/component/k2/item/3331-perjuangkan-hak-pilih-b-trust-latih-fasilitator-kelompok-lansia-dan-disabilitas> (03/10/2013)
- 2.1.2 Kab Majalengka
<http://www.koran-sindo.com/node/334602>
- 2.1.3 Kab Ciamis
<http://www.kabar-priangan.com/news/detail/11011> (08/10/2013)
- 2.1.4 Kab Kuningan
 - (1) <http://www.jurnalcirebon.com/dongkrak-partisipasi-pemilu-b-trust-bidik-lansia-dan-difabel.html> (09/10/2013)
 - (2) http://kuningannews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15245:b-trust-sosialisasi-pemilu-ke-kaum-lansia&catid=323:politik-dan-pemerintahan&itemid=615 (09/10/2013)
 - (3) <http://infopublik.org/read/56883/sosialisasi-dan-pendidikan-pemilih-kelompok-lansia-dan-difabel-pada-pemilu-2014.html> (10/10/2013)
- 2.1.5 Kab Indramayu
<http://www.suarajabar.com/suara-daerah/ciayumajakuning/2803-b-trust-sosialisasikan-program-pendidikan-pemilih-kelompok-lansia-dan-difabel-pada-pemilu-2014.html> (09/10/2013)
- 2.1.6 Kab Sumedang
<http://www.klik-galamedia.com/puluhan-lansia-ikuti-pelatihan-pileg> (11/10/2013)
- 2.1.7 Kab Garut Fokus Jabar
 - (1) <http://fokusjabar.com/2013/10/10/duh-jutaan-jiwa-warga-garut-tak-tersentuh-informasi-pemilu/> (10/10/2013)
 - (2) <http://www.inilahkoran.com/read/detail/2037364/2-juta-lansia-difabel-tak-tersentuh-info-pemilu> (10/10/2013)

- 2.1.8 Kab Bekasi
- (1) <http://bekasiexpresnews.co.id/?p=524> (19/10/2013)
 - (2) <http://www.beritabekasi.co/page/kanal/?id=5028&subid=3700&kanal=peserta-pemilu&alias=jelang%20pemilu,%20b-trust%20adakan%20pelatihan%20bagi%20lansia%20dan%20difabel&page=detil> (20/10/2013)
 - (3) <http://pilarrepublik.com/pilar/news/465/b-trust-adakan--sosialisasi-dan-pendidikan-pemilih-lansia-dan-difable.pilar>
 - (4) <http://menit.tv/read/2013/10/23/24643/0/2/lsm-latih-lansia-ikut-tahapan-pemilu>
- 2.1.9 Kab Karawang
- <http://www.radar-karawang.com/2013/10/10-fasilitator-difabel-dan-lansia-siap.html>
(22/10/2013)
- 2.1.10 Kota Sukabumi
- <http://radarsukabumi.com/?p=88679> (24/10/2013)
- 2.1.11 Kab Cianjur
- <http://harian-pelita.pelitaonline.com/cetak/2013/10/25/kipp-cianjur-gelar-sosialisasi-dan-pendidikan-pemilih#.urhrvvr dxio> (25/10/2013)
- 2.1.12 Kab Subang
- (1) <http://www.pasundanekspres.co.id/subang/10635-disabilitas-dilatih-hadapi-pemilu>
 - (2) <http://www.reportersubang.com/2013/10/upaya-pemenuhan-hak-hak-politik-kaum.html>
- 2.1.13 Kab Purwakarta
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/13/11/06/mvtc4j-ratusan-lansia-akan-peroleh-pendidikan-pemilu>
- 2.1.14 Kota Cimahi
- (1) <http://www.klik-galamedia.com/sosialisasi-pemilu-kelompok-marginal>
 - (2) <http://jabar.tribunnews.com/2013/11/13/kaum-disabilitas-dan-lansia-dapat-sosialisasi-pemilu>
- 2.1.15 Kab Dan Kota Tasikmalaya
- (1) <http://www.bandungnewsphoto.com/?content=politik&op=view&id=144010923>
 - (2) <http://www.antarafoto.com/peristiwa/v1384413901/sosialisasi-pemilu-lansia-dan-difable>
- 2.1.16 Kota Bandung
- <http://jabar.tribunnews.com/2013/11/19/b-trust-sosialisasikan-pemilu-bagi-kaum-disabilitas>

- 2.1.17 Kab Bandung Pikiran Rakyat (20/11/2013)
 - (1) <http://www.pikiran-rakyat.com/node/259295>
 - (2) <http://www.pikiran-rakyat.com/node/259399>

2.2 Media Cetak

- 2.2.1 Fajar Cirebon, Kamis 03 Oktober 2013, Hal ??, “B_Trust Sosialisasikan Pemilu Ke Difabel”
- 2.2.2 Radar Cirebon, Kamis 03 Oktober 2013, Hal 5, “Menekan Angka Golput Penyandang Cacat”
- 2.2.3 Radar Tasikmalaya, Senin 07 Oktober 2013, Hal 18, “Segmen Lansia Dan Difabel Membutuhkan Perhatian”
- 2.2.4 Tribun Jabar, Rabu 09 Oktober 2013, Hal 5, “Keberadaanya Seakan Terlupakan”
- 2.2.5 Pasundan Ekspres, Selasa 22 Oktober 2013, Hal 5, “Antisipasi Golput, B-Trust Gelar Pelatihan”
- 2.2.6 Radar Karawang, Selasa 22 Oktober 2013, Hal 4, “10 Fasilitator Difabel Dan Lansia Siap Terjun”
- 2.2.7 Bandung Ekspres, Rabu 20 November 2013, Hal 10, “Perlakuan Pada Lansia Dan Disabilitas Jadi Prioritas”
- 2.2.8 Pikiran Rakyat, Rabu 20 November 2013, Hal --, “Fasilitator Pemilu Disabilitas”
- 2.2.9 Tribun Jabar, Rabu 20 November 2013, Hal 5, “Alat Bantu Braile Untuk Mencoblos”

2.3 Media Televisi

- 2.3.1 Net. 12 News Link: <https://www.youtube.com/watch?v=flhls2j5fg8>

3. Community Visit

3.1 Media Cetak

- 3.1.1 Radar Sukabumi, 23 Desember 2013, Hal --, “B-Trust Garap Pemilih Lansia”
- 3.1.2 Radar Sukabumi, 23 Desember 2013, Hal 9, “Lansia Dilatih Cara Nyoblos”
- 3.1.3 Aspirasi Rakyat, Edisi 124 Tahun 2, 30 Desember 2013 – 05 Januari 2014, Hal 11, “150 Warga Sudajaya Hilir, Ikuti Sosialisasi Pileg”
- 3.1.4 Bandung Raya, Edisi No. 176/Tahunxi/30 Desember 2013 – 12 Januari 2014, Hal --, Women Crisis Center Adakan Sosialisasi Pemilih Lansia
- 3.1.5 Jurnal Sukabumi, 27 Desember 2013, Hal --, “Lansia Ikuti Sosialisasi Pemilu”

Pemilu merupakan tahapan kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sangat penting dan strategis. Kualitas kepemimpinan nasional yang dihasilkan dari pemilu, tentunya berbanding lurus dan merupakan cerminan dari lancarnya keseluruhan proses pemilihan umum. Parameter keberhasilan Pemilihan Umum antara lain ketepatan waktu seluruh jadwal yang ada, tersedianya seluruh kelengkapan pemilu dalam jumlah dan kualitas seperti yang telah ditentukan, terantisipasi seluruh potensi gangguan yang mengancam keberhasilan pelaksanaan pemilu dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi.

Kendala cukup besar pada pemilu adalah tingkat partisipasi golput yang masih tinggi. Salah satu alasan kenapa mereka memilih golput, karena berbagai keterbatasan sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya, seperti TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang jauh, kondisi fisik yang tidak memungkinkan, tidak mendapatkan akses data informasi yang memadai. Kelompok masyarakat yang memiliki kecenderungan untuk mengalami kendala seperti itu adalah: PENYANDANG DISABILITAS dan LANSIA MARJINAL

Buku ini berisi *empirical evidence* dan *legal evidence* yang mencoba memberikan konfirmasi, klarifikasi, koreksi, dan rekomendasi bagi kebijakan dan pelayanan penyelenggaraan pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah yang terkait dengan hak politik dari kaum penyandang disabilitas dan kaum lansia. **(Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf)**

